

**OPTIMALISASI UNIT PATROLI RODA
EMPAT OLEH SATUAN SAMAPTA DALAM
RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA
CURAT DI WILAYAH HUKUM POLRES
SUKOHARJO**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K)**

Oleh :

AXEL THEODORE WIRASATYA

HUWAE NO. AK 19.217

**AKADEMI KEPOLISIAN
SEMARANG
2023**

ABSTRAK

OPTIMALISASI UNIT PATROLI RODA EMPAT OLEH SATUAN SAMAPTA DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA CURAT DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKOHARJO

Axel Theodore Wirasatyta Huwae, 19.217,
axeltheodore15@gmail.com

Tugas akhir Penulis mengangkat permasalahan mengenai “Bagaimana Mengoptimalkan unit Patroli Roda Empat Satuan Samapta Dalam Rangka Mencegah Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo”. Tugas Akhir ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi metode pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo dan kualitas sumber daya manusia unit Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* melalui observasi terbatas, wawancara dan studi dokumen. Sumber data yang digunakan juga diperoleh dari artikel, buku jurnal dan berita media online yang relevan. Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen, Teori SWOT dan Teori Kompetensi serta empat konsep yang relevan dengan permasalahan yaitu konsep patroli, konsep kamtibmas, konsep pencurian dengan pemberatan dan konsep optimalisasi sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

Hasil penelitian menemukan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang tertinggi di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Pelaksanaan kegiatan patroli yang dilaksanakan memiliki masalah pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar memetakan daerah kerawanan, koordinasi dengan polsek jajaran, serta pengawasan secara langsung oleh pimpinan terhadap pelaksanaan patroli sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki perlu dilaksanakan peningkatan kemampuan serta wawasan dari anggota patroli melalui forum diskusi dan pelatihan yang

diadakan oleh Polres Sukoharjo sehingga pelaksanaan patroli dapat optimal.

Kata Kunci : *Optimalisasi Patroli, Satuan Samapta, Pencegahan tindak pidana Curat*

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF FOUR-WHEELED PATROL UNITS BY SAMAPTA UNITS IN ORDER TO PREVENT CURAT CRIMES IN THE JURISDICTION OF SUKOHARJO POLICE STATION

Axel Theodore Wirasatyta Huwae, 19.217, axeltheodore15@gmail.com

The author's final project raises the issue of "How to Optimize the Four-Wheeled Patrol Unit of the Samapta Unit in order to Prevent Theft with Aggravation in the Sukoharjo Police Jurisdiction". This Final Project aims to identify the method of implementation of the Sukoharjo Police Samapta Unit Four-Wheeled Patrol and the quality of human resources of the Sukoharjo Police Samapta Unit Four-Wheeled Patrol. This research uses a qualitative approach with the type of field research through limited observation, interviews, and document studies. The data sources used were also obtained from relevant articles, books, journals, and online media news. This research uses Management Theory, SWOT Theory and Competency Theory as well as four concepts relevant to the problem, namely the concept of patrol, the concept of kamtibmas, the concept of theft with weight and the concept of optimization in accordance with Perkabaharkam Number 1 of 2017 concerning Patrol.

The results of the study found that the crime of theft with aggravation is the highest crime in the jurisdiction of Sukoharjo Police Station. The implementation of patrol activities carried out has problems in planning, organizing, implementing, and supervising. Based on the results of the study, the author suggests mapping vulnerable areas, coordination with police ranks, and direct supervision by the leadership of patrol implementation in accordance with Perkabaharkam Number 1 of 2017 concerning Patrols. To improve their human resources, it is necessary to increase the ability and insight of patrol members through discussion forums and training held by

Sukoharjo Police Station so that the implementation of patrols can be optimal.

Keywords : Optimization of Patrol, Samapta Unit, Prevention Of Theft In The Jurisdiction crime

BAB I

PENDAHU

LUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi termasuk ke dalam bagian dari provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo diapitnya oleh berbagai macam kabupaten serta juga kota yakni di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar serta Kota Surakarta, lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul serta Wonogiri, serta kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.

Situasi keamanan serta ketertiban di wilayah Polres Sukoharjo mengalami peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi. Salah satunya perkara tindak pidana seperti pencurian dengan pemberatan secara kuantitas dan kualitas mengalami peningkatan akibat kurangnya kepedulian masyarakat kabupaten Sukoharjo terhadap keamanan lingkungan masing-masing. Dalam pelaksanaannya pelaku tindak pidana curat banyak yang dengan mobilitas tinggi dan semakin berkembang dalam melakukan operasional serta pembagian tugas maupun lebih selektif dalam pemilihan target/sasarannya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara memiliki tugas pokok untuk memelihara ketertiban serta keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan melayani,

melindungi, serta juga mengayominya para penduduk maupun masyarakat. Perihal demikian dengan tujuan guna memelihara ketertiban serta keamanan para penduduk dalam negeri. Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah diaturkannya secara jelas pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terdapat tiga macam tugas pokok dari Polri, yaitu :

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Salah satu dari tugas pokok Polri yaitu memelihara ketertiban serta keamanan para penduduk. Ketertiban serta keamanan para penduduk ialah sebuah situasi yang diperlukan oleh para penduduk pada perihal pembangunan ataupun bersosialisasi kepada para penduduk yang lain. Situasi kamtibmas yang baik merupakan harapan dari keseluruhan para penduduk untuk bisa diwujudkan, hingga menimbulkan perasaan yang damai serta tenram untuk tiap-tiap dari para penduduk, serta bisa meningkatkan semangat maupun motivasi dalam bekerja dikarenakan hilangnya rasa takut yang diakibatkan oleh adanya kemungkinan terkait dalam hal gangguan kamtibmas. Namun seiring dengan perkembangan zaman, memelihara keamanan dan ketertiban bukan hal yang mudah saat ini karena masalah-masalah yang terjadi berkembang dan kompleks sejalan dengan pola pemikiran masyarakat yang lebih modern. Seiring dengan perkembangan zaman, Hal ini merupakan suatu tantangan bagi Polri untuk ikut berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

Dalam melakukan tugas pokoknya, Polri sering

dihadapkan dengan tindakan kriminalitas. Tindakan kriminalitas yang sering terjadi di masyarakat ialah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan secara yuridis sudah diaturkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat (1) dengan bunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Terkait dengan hal tersebut, Polri harus mampu melaksanakan tugas dengan maksimal utamanya dalam pencegahan. Satuan samapta merupakan salah satu fungsi teknis kepolisian untuk melakukan upaya preventif dalam rangka pemeliharaan ketertiban serta keamanan dengan cara melalui aktivitas ataupun kegiatan yang terkait dengan penjagaan, pengaturan, patroli serta pengawalan dan pencegahan tahap awal. Fungsi teknis samapta dituntutnya untuk terus selalu ikut dan hadir perihal melakukan pengawasan di tiap-tiap aktivitas masyarakat untuk mencegah terjadinya gangguan harkamtibmas. Kegunaan dari samapta itu

sendiri sudah membagi kedalam beberapa unit layaknya pengaturan, pengawalan, penjagaan, serta juga patroli.

Patroli ialah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai sebuah usaha untuk melakukan pencegahan terkait dengan terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkannya oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, serta gangguan yang nyata dengan cara menjelajahi, mendatangi, mengawasi, mengamati, memperhatikan situasi, serta ataupun kondisi yang diperkirakan akan membuat terjadinya suatu gangguan nyata yang membutuhkan kehadiran Polri untuk melakukan berbagai macam tindakan kepolisian yang sebagaimana tertuang dalam Perkabaharkam No.1 Tahun 2017 mengenai Patroli. Berdasarkan UU tersebut kegiatan patroli diadakan

untuk menghilangkan unsur peluang atau kesempatan bagi masyarakat yang memiliki niat dalam melakukan pelanggaran hukum. Dalam pelaksanaan patroli, Polri hadir di sekitar masyarakat untuk memberikan rasa aman dengan menghilangkan ancaman dan gangguan kamtibmas. Dengan demikian kejahatan yang dapat terjadi di masyarakat dapat ditekan sehingga menghilangkan ancaman yang akan terjadi. Satuan samapta bhayangkara (Sabhara/Samapta) melalui kegiatan patroli seharusnya menjadi penangkal bagi ancaman penyakit masyarakat yang akan terjadi. Namun dalam kenyataannya, di Kabupaten Sukoharjo ancaman seperti pencurian dengan pemberatan masih sering ditemukan.

Tabel 1. 1
Data tindak pidana pencurian dengan pemberatan Polres Sukoharjo

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN		
TAHUN	LAPORAN	SELESAI

2020	56	27
2021	31	23
2022	70	34

Sumber: Urmintu Reserse Polres Sukoharjo

Berdasarkan Tabel 1.1 Data tindak pidana pencurian dengan pemberatan Polres Sukoharjo, kejahatan pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan secara fluktuatif pada tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tindakan pencegahan oleh Polres Sukoharjo melalui unit Patroli roda empat Satuan Samapta masih belum optimal sehingga masih terjadinya aksi pencurian dengan pemberatan.

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari Patroli

mempergunakan kendaraan bermotor roda empat, dilaksanakan dengan sistematika seperti berikut: Anggota/Petugas patroli berangkat dari Mako Polres menggunakan kendaraan roda empat, menggunakan sabuk keselamatan, melakukan patroli minimal dua orang atau lebih, berkendara di sebelah kiri jalan, setelah itu melakukan pengawasan, pengamatan dan pemantauan di tempat sasaran patroli, dalam hal malam hari apabila pencahayaan kurang petugas dapat mempergunakan jaket keselamatan, menyalakannya lampu rotator serta kendaraan. Melakukan pemberhentian pada area tertentu untuk melakukan tindakan kepolisian apabila berpotensi sebagai gangguan keamanan, petugas melakukan kegiatan dialog kepada para penduduk. Dialog itu dimaksudkannya teruntuk memperoleh informasi penting terkait dengan kondisi maupun situasi kamtibmas.

Dengan konsep patroli menggunakan kendaraan roda empat tersebut, masyarakat diharapkan dapat menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan dan memunculkan rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya apabila melihat atau mengetahui adanya kejahatan serta segera melaporkannya kepada anggota Kepolisian terdekat. Dengan demikian seharusnya tingkat pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo menjadi berkurang. Atas beberapa alasan dan masalah itulah Penulis mengangkat judul **“ Optimalisasi Unit Patroli Roda Empat Oleh Satuan Samapta Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Curat di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo”**

1.2 Permasalahan

Setelah dilakukan penelitian dan pengamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo, penulis bisa mengambil permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Optimalisasi unit Patroli Roda Empat oleh Satuan Samapta dalam rangka mencegah Tindak Pidana Curat di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan penjelasan diatas yang sudah dipaparkan dan pada latar belakang masalah diatas maka dengan demikian ditetapkan beberapa rumusan permasalahan, diantaranya ialah :

1. Bagaimana metode pelaksanaan unit patroli roda empat satuan samapta dalam rangka mencegah tindak pidana curat di wilayah Polres Sukoharjo ?
2. Bagaimana kualitas sumber daya manusia unit Patroli roda empat Satuan samapta dalam rangka mencegah tindak pidana curat di wilayah hukum Polres Sukoharjo?

1.3 Maksud dan tujuan

Tujuan dari adanya penelitian ini ialah seperti berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan metode pelaksanaan patroli roda empat oleh Unit Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo dalam rangka mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mendeskripsikan kualitas personil unit Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo dalam rangka mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penelitian yang dilakukan diharap untuk bisa memberi manfaat pada para pembaca. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari riset ini ialah :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian penulis ialah teruntuk mengetahui bagaimana patroli roda empat yang dilakukannya oleh Unit patroli Satuan Samapta Polres Sukorhajo dalam tugasnya untuk menekan angka pencurian dengan pemberatan. Dalam penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat sebagai referensi ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah terkait kasus pencurian dengan pemberatan. Hasil dari riset ini juga bisa dijadikannya sebagai referensi maupun acuan dalam optimalisasi serta kajian dalam referensi Patroli Roda Empat bagi Satuan Samapta di Polres Sukoharjo.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi, hasil daripada riset ini diharap untuk bisa menjadi wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kepolisian dan pencegahan kejahatan khususnya dalam hal pencurian dengan pemberatan.
2. Bagi Kepolisian, hasil daripada riset ini diharap untuk bisa memberi sumbangan pemikiran pada institusi Polri perihal keputusan yang akan digunakan oleh Kepolisian terkait pemecahan permasalahan

- pencurian dengan pemberatan.
- c. Bagi masyarakat, hasil daripada riset ini diharap untuk bisa memberi manfaat ilmu pengetahuan mengenai penanganan masalah pencurian dengan pemberatan, Serta perlunya partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan pencurian dengan pemberatan.

1.4 Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian yang ada pada penelitian kualitatif lebih didasarkan kepada permasalahan yang bakal dipecahkan ataupun diselesaikan dan juga batasan-batasan yang telah ditentukan sesuai pada masalah yang ada di dalam riset ini. Fokus penelitian ini yakni metode pelaksanaan patroli roda empat oleh satuan samapta perihal melakukan pencegahan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ada di wilayah hukum Polres Sukoharjo, mencakup diantaranya yakni pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan yang dikerjakan. Kemudian, menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan patroli roda empat sat samapta dalam rangka melakukan pencegahan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ada di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Selanjutnya, membahas kualitas SDM yang dimiliki oleh personil Unit Patroli roda empat Satuan Samapta dalam rangka mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

1.5.1.1 Pendekatan penelitian

Dalam menulis Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan

secara kualitatif. Berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian No : KEP/153/X/HUK/4.5/2021 mengenai Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian di jelaskan “penelitian kualitatif, adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data secara natural dengan memanfaatkan diri peniliti sebagai instrumen kunci”. Menutur dari Denzin & lincoln (dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018) mengemukakan bahwasanya penelitian kualitatif berusaha teruntuk menemukan serta menggambarkan secara naratif atas aktivitas yang dilakukan serta efek maupun dampak dari dilakukannya tindakan tersebut pada kehidupan mereka.

Pendekatan kualitatif menekankan sifat alamiah dari berbagai macam fenomena yang terjadinya sebagai sumber data peneliti mengamati, mecatat, bertanya menggali sumber yang berhubungan dengan peristiwa yang sudah atau sedang terjadi. Hal yang diamati tidaklah terlepas dari konteks lingkungan yang mana tingkah laku berlangsung.

1.5.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada studi kasus dan penlitian lapangan (*Field Research*), yang mana riset yang dilakukan membeberikan informasi yang sesai dengan kenyataan dan juga kejadian yang sebenar-benarnya terjadi agar dapat memberikan gambaran hasil penelitian dengan jelas dan sesuai fakta di lapangan. Menurut Creswell (2002:114), penelitian studi kasus ialah suatu penelitain yang dilakukannya pada sebuah objek, yang disebutkan juga sebagai suatu kasus, yang dilakukan secara menyeluruhk,

seutuhnya, serta secara mendalam dengan cara mempergunakan berbagai macam sumber data.

Menurut dari Creswell (2002:139), studi kasus memiliki empat keunggulan, yaitu:

1. Studi kasus bisa mengungkapkan berbagai macam perihal yang unik, spesifik, serta juga bermacam-macam perihal yang sangat terperinci ataupun mendetail yang tidaklah bisa diungkapkannya oleh studi lainnya. Studi kasus bisa mengungkapkan makna dibalik dari fenomena pada situasi maupun kondisi yang natural maupun apa adanya.
2. Studi kasus tidaklah hanya sekedar memberikan laporan secara faktual, namun juga memberikan suasana kebatinan, nuansa, serta berbagai macam pikiran yang tidaklah berkembang pada kasus yang dijadikan sebagai suatu bahan studi yang tidaklah bisa ditangkap oleh penelitian kuantitatid secara ketat.
3. Bahwa peneliti bisa mempelajarinya subjek dengan cara yang menyeluruh serta juga mendalam.
4. Bahwasanya peneliti bisa mempelajarinya subjek dengan cara yang mendalam pada siayi konteks, sumber data yang cukup banyak, memperlibatkan berbagai macam faktor hingga dimungkinkannya terdapat berbagai penemuan yang lain yang ada diluar dari pertanyaan terkait dengan permasalahan, serta jika penelitian dilakukannya dengan cara yang benar maka daripada demikian teori yang dihasilkan bisa menjawab masalah.

1.5.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah manajemen kegiatan patroli roda empat satuan samapta Polres Sukoharjo, berbagai macam faktor apa saja yang mempengaruhi, dan kompetensi

personil dalam rangka menegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Komponen penting dalam penelitian kualitatif adalah: tempat (*place*), Pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang dikemukakan oleh Spradley dalam Sugiyono (2011 : 215) dikenal dengan nama situasi sosial. Adapun *actors* dalam penelitian ini adalah Unit Patroli Roda Empat Satuan Samapta dengan *activity* yaitu upaya mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang dilaksanakan oleh Unit Patroli Satuan Samapta Polres Sukoharjo. Dan *Place* untuk penelitian tersebut berada di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

1.5.4 Sumber Data

Sumber data dengan pendekatan kualitatif penelitian ini berdasar dari 3 sumber yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, sumber data tersier.

1.5.4.1 Sumber Data Primer

“Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya” (Saifuddin Azwar, 2012: 36). Dalam penelitian ini, yang merupakan sumber data primer yaitu :

- a. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo

AKBP Wahyu Nugroho Setyawan S.I.K., M.Pict., M.Krim., Sebagai pimpinan kesatuan wilayah hukum Polres Sukoharjo yang dapat memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan patroli serta kebijakan yang diterapkan di Polres Sukoharjo yaitu

- b. Kasat Samapta Polres Sukoharjo

AKP Sri Haryanto, S.Sos., Merupakan Kepala

satuan sampta bhayangkara Polres Sukoharjo yang tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang permasalahan turjawali yang salah satunya yaitu pelaksanaan patroli.

c. Kanit Turjawali Polres Sukoharjo

AIPTU Rusmani, Merupakan kepala unit patroli yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi pelayanan patroli roda empat.

1.5.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak disahkan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Sumber data disini berupa sumber tertulis yang terbagi dalam sumber buku, sumber arsip, sumber ilmiah, dokumen resmi dan pribadi. Adapun sumber tertulis dalam penelitian ini yaitu dokumen dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi dan pribadi. Sumber data sekunder ini di maksudkan untuk mempertajam kajian teoritis, metodologi, serta mendapatkan informasi mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Perkap No. 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Polri
- c. Perkabaharkam No 1 Tahun 2017 tentang Patroli
- d. Intelijen dasar Polres Sukoharjo.
- e. laporan kesatuan Satsamapta Polres Sukoharjo.
- f. Data
- g. laporan Hasil Kegiatan.

1.5.4.3 Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data penunjang dari

kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan literatur lain yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penilitian ini sumber data tersier di dapat dari internet dengan sumber terpercaya, pendapat ahli-ahli dan lain-lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Teknik wawancara**

Teknik wawancara merupakan teknik utama yang dilakukan dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait fenomena yang diteliti. Pelaksanaan wawancara secara langsung dilakukan kepada beberapa responden yaitu sebagai berikut:

1. Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugraha Setyawan S.I.K., M.PICT., M.Krim
2. Kasat Samapta Polres Sukoharjo, AKP Sri Haryanto S.Sos
3. Kanit Turjawali Polres Sukoharjo AIPTU Rusmani
4. Anggota Unit Patroli roda empat Sat Samapta Polres Sukoharjo
5. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo

b. **Teknik observasi**

Teknik obeservasi dilakukan agar peneliti dapat terlibat dan menyaksikan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan sehingga peneliti dapat memberikan penilaian secara langsung bagaimana perilaku-perilaku yang muncul terhadap masalah yang diteliti selama proses penelitian.

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan bagaimana Unit Patroli Roda Empat Sat Samapta Polres

Sukoharjo dalam melaksanakan patroli dalam rangka mencegah pencurian dengan pemberatan.

1.5.6 Validitas

Untuk menetukan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono (2011: 273), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber mengenai pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo.
- b. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, yaitu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Validitas merupakan uji keabsahan data dalam penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *transformability*, *dependability*, *credibility*, dan triangulasi. Penelitian ini mengambil uji keabsahan dengan triangulasi yaitu uji keabsahan dengan menggabungkan teori dan konsep, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Proses penggabungan dilakukan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan, (Moleong, 2014 :330) Penelitian kualitatif adalah sebuah aktivitas ilmiah dengan menggunakan prosedur yang disadari dan terkontrol. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang peduli dengan persoalan reliabilitas data, penelitian kualitatif hanya peduli dengan validitas data. Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang

diungkapkan oleh peneliti.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti adalah model analisis Miles dan Huberman. Model ini memiliki tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan satuan dari proses analisis data untuk memperjelas, mempersingkat, membuat fokus, mengatur data, dan membuang hal yang tidak penting. Reduksi data merupakan proses seleksi, menyederhanakan, membuat abstraksi dari data kasar yang ada dilapangan, wawancara dan data dilapangan

2. Sajian Data

Sajian data merupakan kumpulan informasi dari reduksi data yang disajikan untuk kemudian disimpulkan. Sajian data ini disusun dengan urut dan sistematis juga menyeluruh berkaitan dengan masalah yang diteliti, sajian data merupakan saran kontrol dan evaluasi mengenai data dan informasi yang dikumpulkan, sehingga peneliti mengetahui bila kekurangan data yang lengkap sehingga dapat disusun sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dapat diakukan setelah penarikan data selesai. Kesimpulan juga diverifikasi dan ditinjau kembali secara sepintas guna mendapatkan pemahaman yang lebih tepat.

Analisa data kemudian dapat diartikan dan disusun

secara sistematis sehingga dapat menggambarkan dengan jelas upaya pengoptimalan dalam pelaksanaan patroli roda empat satuan samapta dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan Penelitian memuat tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya juga memiliki hubungan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Studi kepustakaan merupakan keharusan untuk dilakukan dalam suatu proses penelitian. Kepustakaan Penelitian memiliki peran penting dalam memberitahukan kepada pembaca tentang hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sebagai referensi dan bahan dasar acuan peneliti yang berkaitan dengan persamaan permasalahan dalam suatu penelitian. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang perbedaan dan persamaan terhadap penelitian terdahulu untuk membandingkan suatu hasil penelitian.

Kepustakaan penelitian yang dapat menjadi refensi terkait dengan adanya penelitian ini adalah seperti yang dilakukan oleh Lucky Andreaz (2017). Hasil dari penelitian ini yang dapat diambil dari penelitian tersebut yaitu faktor pendukung dan penghambat patroli didaerah penelitiannya. Faktor yang mendukung pelaksanaan patroli didaerah penelitiannya yaitu sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya dukungan BBM untuk melaksanakan patroli, kurangnya personel sabhara untuk

melaksanakan patroli secara optimal, dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di daerah penelitiannya.

Berikut adalah tabel mengenai persamaan dan perbedaan beberapa penelitian yang terdahulu dan berkaitan dengan rencana penelitian ini. Persamaan dan Perbedaan Penelitian terkait, yaitu:

Tabel 2. 1
Perbedaan dan persamaan kepustakaan penelitian

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lucky Andreaz (2017)	Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Klaten	Kekurangan yang ditemukan adalah personil patroli, dukungan anggaran BBM untuk melaksanakan patroli, dan kepedulian masyarakat terkait kamtibmas	Metode Kualitatif	lokasi Penelitian, Fokus Penelitian adalah Patroli Roda Empat
2	Yobhel Ievic De Fretes (2017)	Optimalisasi Patroli Bersinggungan Oleh Unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara	Faktor Penghambat yaitu kurangnya personel, perlengkapan perseorangan, transportasi	Metode Kualitatif	lokasi Penelitian

		Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di	dan anggaran BBM serta anggota yang belum mengikuti dikjur Patroli		
3	Tengku Ilham Akbar (2022)	Optimalisasi Patroli Satuan Samapta Dalam Pencegahan Tindak Pidana Curat Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo	Faktor penghambat yaitu kurangnya anggota unit turjawali, pembagian tugas, profesionalisme dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Metode kualitatif	lokasi penelitian

Berdasarkan Tabel 2.1 Perbedaan dan persamaan kepustakaan penelitian yang penulis gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dari tiga penelitian yang terdahulu pada tiga tempat dan waktu yang berbeda yaitu adanya kesamaan dari metode penelitiannya yaitu metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya pada tiga penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu pada lokasi penelitian dan fokus penelitian.

Kemudian dari hasil penelitiannya juga ada kesamaan berupa kurangnya personel patroli, dukungan anggaran untuk BBM pelaksanaan patroli, kelengkapan patroli maupun perorangan serta sertifikasi mengikuti pendidikan kejuruan sabhara dari personil patroli, dan kesesuaian pelaksanaan tugas menurut ketentuan yang berlaku.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Menurut Sukmadinata dalam Metode Penelitian Kualitatif (Gunawan, 2013, 83), Peneliti kualitatif harus memiliki dasar penelitian kualitatif yaitu konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu (Sukmadinata, dalam Gunawan). Kepustakaan konseptual menyajikan teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yakni memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam buku, jurnal, materi perkuliahan yang tertulis dalam bentuk modul yang sudah memiliki ISSN/ISBN, makalah lepas, majalah, surat kabar dan tulisan dalam metode teknologi informasi, serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum ilmiah, wawancara, dan/atau pidato umum juga bisa termasuk dalam jenis kepustakaan ini.

2.2.1 Teori

2.2.1.1 Teori Manajemen

Teori Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud maksud yang nyata (George R. Terry dan W. Rue).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori manajemen yang diusung oleh Geogre R. Terry, yang mengklasifikasikan prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut:

a. *Planning* atau perencanaan

Kegiatan yang menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

b. *Organizing* atau pengorganisasian

Kegiatan mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

c. *Actuating* atau Penggerakan

Kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.

d. *Controlling* atau pengawasan

Proses pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya menurut Terry dalam Dasar-Dasar Manajemen (2014 : 9)

2.2.1.2 Teori Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Teori analisis swot digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan Faktor apa saja yang mempengaruhi giat unit patroli Sabhara dalam mencegah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

2.2.1.3 Teori Kompetensi

Spencer & Spencer (1993) menyatakan kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang terdiri dari:

- a. *Knowledge* (pengetahuan)

Knowledge atau pengetahuan, adalah mengetahui, memahami, dan menguasai informasi atau pengetahuan yang digunakan dalam bidang tertentu.

- b. *Skill* (keterampilan)

Skill atau keterampilan merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

- c. *Attitude* (perilaku)

Attitude atau sikap yang dimiliki seorang dalam merespon dan menyikap lingkungan sekitarnya.

2.2.2 Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi (Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1987. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: IP3ES. h 33) Konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak (abstraksi) suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi obyek.

2.2.2.1 Konsep Patroli

Sesuai dengan Peraturan Kabaharkam Polri No.1 Tahun 2017 pasal 1 angka (3), konsep patroli adalah

“Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.”

-
- Sesuai dengan Peraturan Kabaharkam Polri No.1 Tahun 2017 pasal 2, tujuan dari patroli adalah:
- a. Meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas;
 - b. Menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat;
 - c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcar lantas), serta memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat;
 - d. Terwujudnya pemeliharaan Kamtibmas;
 - e. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
 - f. Memberikan pelayanan masyarakat berupa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Petugas Patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
 - g. Terwujudnya rasa aman masyarakat; dan
 - h. Mendorong revitalisasi fungsi Patroli terutama pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam rangka pengisian personel yang lebih menitik- beratkan pada pemenuhan jumlah Petugas Patroli.

2.2.2.2 Konsep Kamtibmas

Mengacu pada UU No.2 Tahun 2002 pasal 1 nomor 5 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengertian dari kamtibmas adalah Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2.2.2.3 Konsep Pencurian dengan pemberatan

Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak; (KUHP 101.)
 2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempat bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh rang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; (KUHP 98, 167 dst., 365.)
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (KUHP 364 dst.)
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99 dst., 364 dst.)
- (2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (KUHP 35, 366, 486.)

2.2.2.4 Konsep Optimalisasi

Menurut (Nurrohman, 2017) Optimalisasi adalah upaya

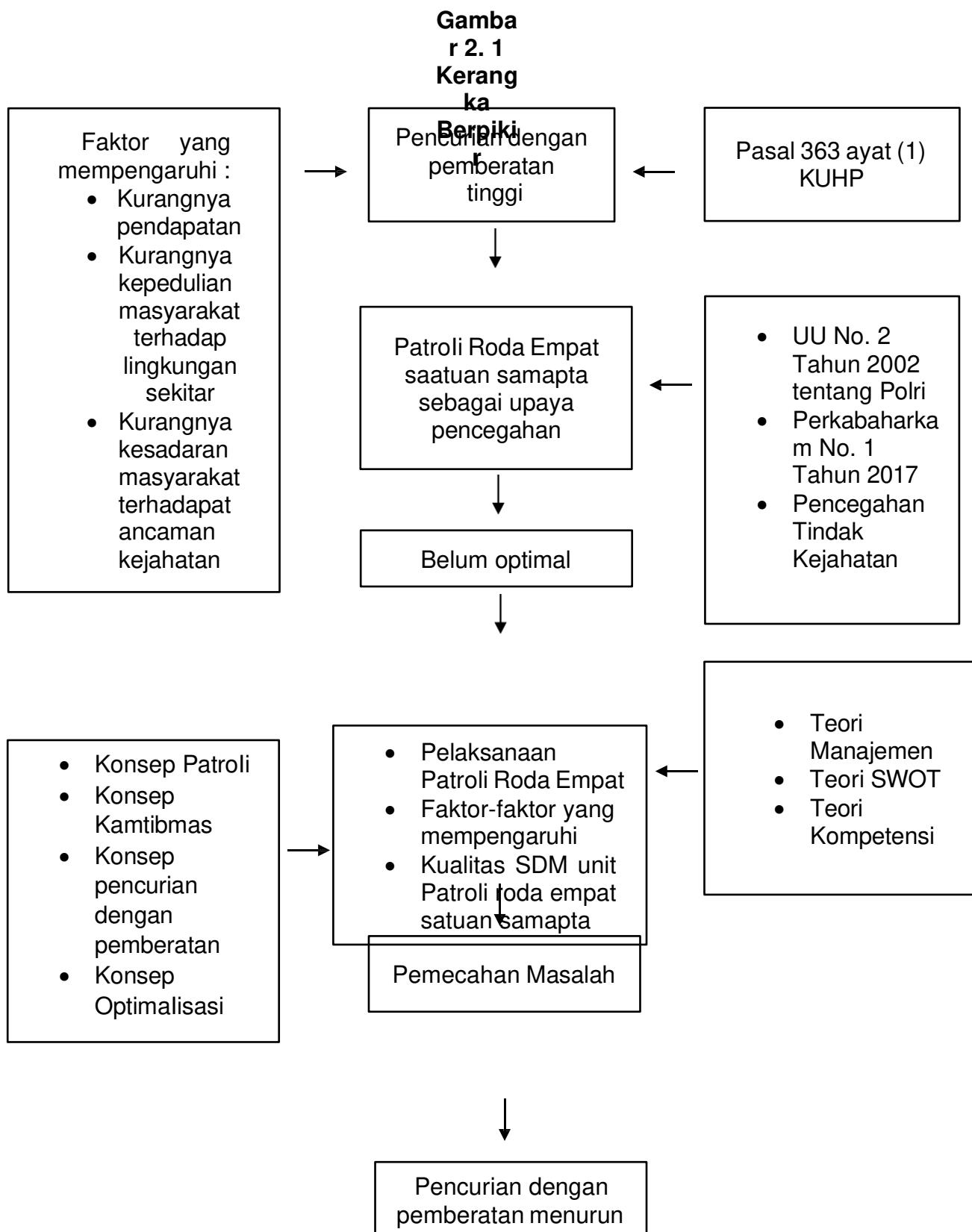
meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.

2.2.3 Kerangka Berpikir

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Sukoharjo cenderung fluktuatif dengan modus dalam melakukan aksi pencurian dengan pemberatan sehingga membuat masyarakat di Kabupaten Sukoharjo merasa terganggu. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Sukoharjo merupakan suatu upaya tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sudah menjadi peran Kepolisian Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dan mengakkan hukum.

Agar memudahkan dalam memahami permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan, dibuatlah kerangka berpikir yang memberikan gambaran secara umum tentang hal yang akan diteliti.

Penelitian ini bermula dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo, sebagai upaya pencegahan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, Polres Sukoharjo melakukan upaya-upaya pencegahan. Kegiatan patroli yang dilakukan unit Patroli roda empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo merupakan salah satu upaya pencegahan tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Sukoharjo.



BAB III

KONDISI FAKTUAL

3.1 Kondisi awal

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 150 desa dan 17 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.4666 Ha atau sekitar 1,43 % luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Polokarto yaitu 6.218 Ha (13%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 Ha (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo.

Gambar 3. 1
Peta Wilayah Kabupaten Sukoharjo



Seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo, kondisi medan dapat dijangkau dengan sarana transportasi dan akses jaringan komunikasi yang ditunjang oleh infrakstruktur yang memadai. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keluarga berencana, pada tahun 2021 jumlah penduduk tercatat sebanyak 907.587 jiwa yang terdiri dari 454.143 laki-laki (50,06 %) dan 453.444 perempuan (49,94 %). Dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.945 jiwa per Km2.

Kondisi ekonomi kabupaten Sukoharjo secara tidak langsung tetap dipengaruhi oleh situasi ekonomi nasional dan ekonomi global. Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang secara langsung terpengaruh, sehingga akan berdampak pada pencapaian pendapatan asli daerah dan penyusunan APBD TA 2021. Dampak pandemi covid-19 yang sampai saat ini melanda di seluruh dunia internasional berdampak kepada sektor ekonomi, dimana banyak jenis usaha baik kecil sampai usaha besar/perusahaan banyak yang terdampak dikarenakan pandemi covid-19 ini.

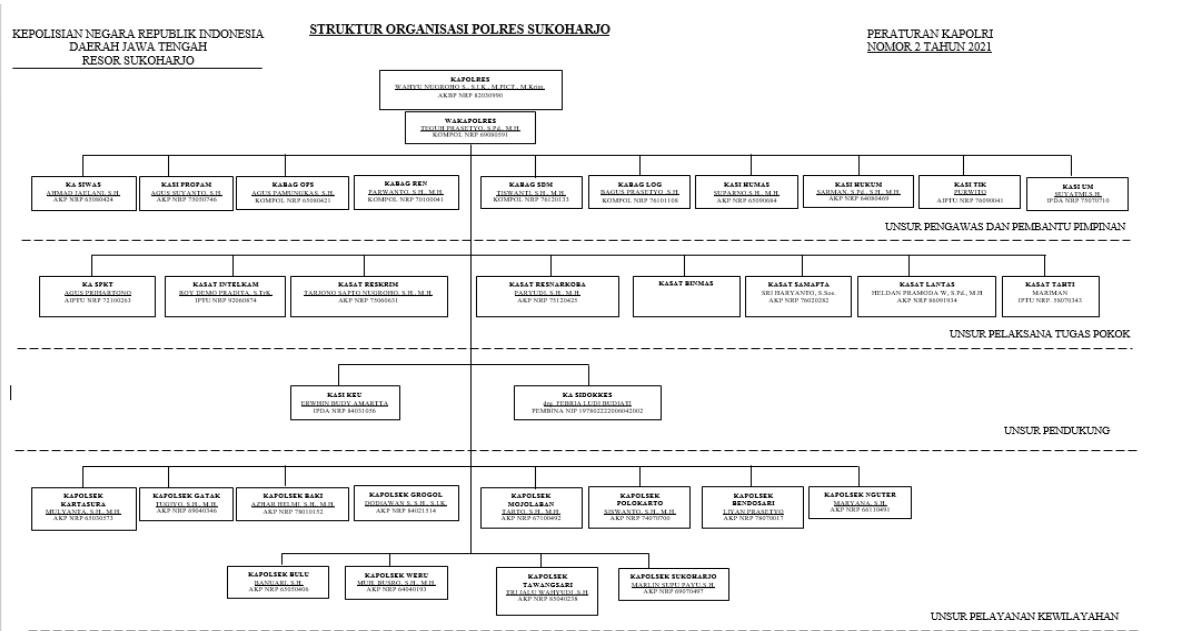
Kejahatan konvensional seperti pencurian (curras, currat, curranmor), penganiayaan, penipuan dan lain-lain masih mendominasi kriminalitas di Kab. Sukoharjo. Selain itu kejahatan khusus seperti kekerasan dalam rumah tangga, narkotika, perjudian juga masih terjadi di wilayah Kab. Sukoharjo.

3.1.2 Gambaran Umum Polres Sukoharjo

Kepolisian Resor Sukoharjo atau Polres Sukoharjo merupakan pelaksana kewilayahan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang berada dibawah Polda Jawa Tengah. Polres Sukoharjo yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R.Soeprapto, Tanjungsari, Sukoharjo termasuk dalam klasifikasi tingkat "B"

sehingga dipimpin oleh perwira menengah Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Pada saat ini Polres Sukoharjo dipimpin oleh AKBP Wahyu Nugroho Setiawan SIK, M.Pict, M.Krim. Wilayah hukum Polres Sukoharjo terdiri dari 12 Polsek di Kabupaten Sukoharjo. Dalam menjalankan tugasnya Kapolres dibantu oleh unsur pelaksana dan unsur pendukung diantaranya Kepala Bagian Operasional (Kabagops), Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM), Kepala bagian Perencanaan (Kabag Ren), dan Kepala Bagian logistik (Kabaglog) Kepolisian Resor Sukoharjo bertugas menjalankan tugas pokok polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polres Sukoharjo dalam organisasinya berpedoman kepada Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Polres Sukoharjo memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Polres Sukoharjo

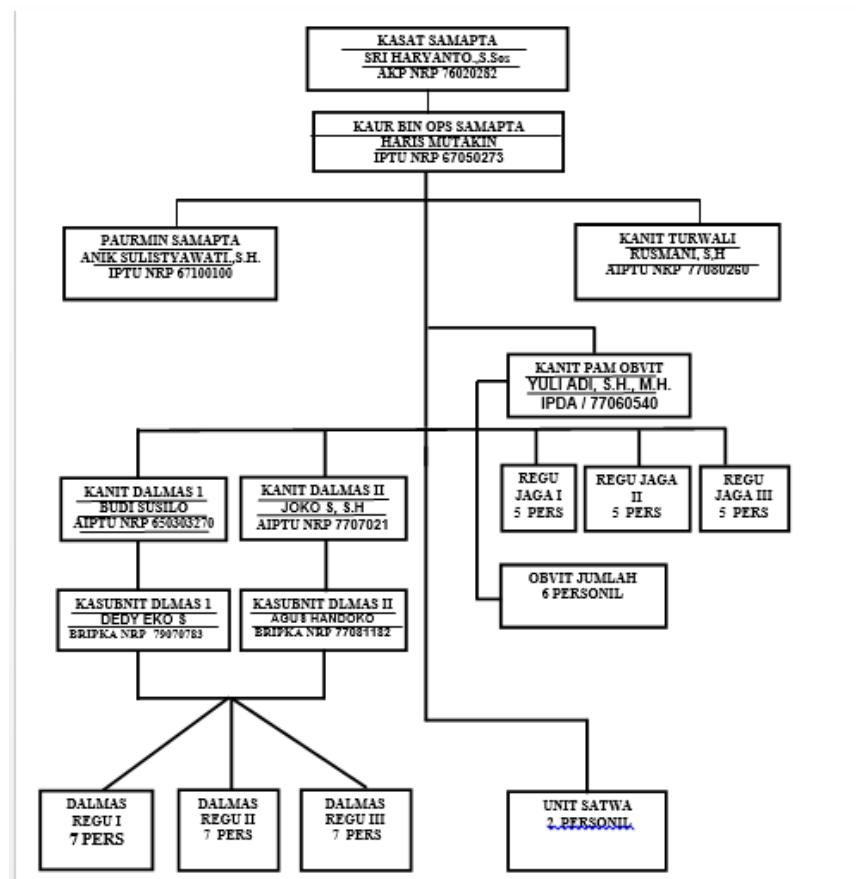


Sumber : Urmintu Polres Sukoharjo

3.1.3 Gambaran umum Satuan Samapta Polres Sukoharjo

Berdasarkan Peraturan Kepolisian nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Satuan Samapta Polres Sukoharjo merupakan unsur pelaksana tugas kepolisian dibidang pencegahan kejahatan atau preventif pada tingkat Polres yang kegiatannya berupa turjawali, TPTKP, pengamanan obyek vital dan pengendalian massa.

Gambar 3. 3
Struktur Organisasi Satuan Samapta



Sumber : MinOps SatSamapta Polres Sukoharjo

Berdasarkan struktur organisasi diatas. Satuan Samapta Polres Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kasat Samapta

dipimpin oleh seorang perwira Polri ber pangkat Ajun Komisari Polisi (AKP). Pada saat ini Kasat Samapta Polres Sukoharjo dipimpin Oleh AKP. Sri Haryanto S.Sos. Dalam menjalankan tugasnya kasat samapta dibantu oleh Kaur dan Kanit dengan jumlah personil satuan samapta Polres Sukoharjo berjumlah 68 personil. Satuan Samapta Polres Sukoharjo terbagi menjadi 4 unit yang masing-masing unit menjalankan tugas dan fungsi yang berbeda. Patroli Roda empat merupakan tanggung jawab unit patroli yang dipimpin oleh seorang kanit ber pangkat AIPTU dibidang turjawali.

3.1.4 Gambaran Umum Unit Turjawallii Satuan

Samapta Poires Sukoharjo

Unit Turjawali dipimpin oleh Kanit Turjawali Aiptu Rusmani Haidar S.H membantu tugas Kasat Samapta dalam pelaksanaan kegiatan pengaturan, pengawalan, pengaturan, penjagaan, dan patroli. Kanit Turjawali mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan anggota unit Turjawali, membuat jadwal pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli sesuai dengan SOP, mengarahkan anggota Turjawali, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kasat Samapta. Unit Turjawali satuan samapta Polres Sukoharjo memiliki jumlah personel sebanyak 6 orang, 1 kanit dan 5 anggota, namun 4 personel merupakan anggota dalmas.

3.1.5 Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian dengan

Pemberatan di Polres Sukoharjo

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana yang paling tinggi jika dengan tindak pidana lainnya. Pada tahun 2022 total tindak pidana pencurian dengan pemberatan meningkat menjadi 70

kasus dimana pada tahun 2021 ada 31 kasus. Dalam data anatomi kasus tahun 2022 di Polres Sukoharjo, tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini mayoritas sering terjadi di perumahan sebanyak 27 kasus. Untuk pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan usianya 21 tahun keatas. Kebanyakan dari pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui merusak pintu pada pukul 00.00 – 06.00.

Tabel 3. 1**Anatomi Kasus pencurian dengan pemberatan tahun 2022**

NO	JENIS MODUS OPERANDI	JML
1	RUSAK PINTU	18
2	RUSAK JENDEIA	11
3	RUSAK ATAP	2
4	RUSAK ALMARI	7
5	DENGAN MUDAH	7
6	PANJAT DINDING	13
7	LAIN-LAIN	12
JUMLAH		70

NO	LOKASI	JML
1	JALAN UMUM	-
2	PERUMAHAN /PERMUKIMAN	27
3	SEKOLAHAN/ KAMPUS	-
4	PERKANTORAN /PERUSAHAAN	9
5	PERTOKOAN / SWALAYAN /PASAR	15
6	TEMPAT HIBURAN	7
7	OBYEK WISATA	7
8	LAIN - LAIN	5
JUMLAH		70

NO	USIA	JML
1	06 s/d 15 th	-
2	16 s/d 20 th	-
3	21 s/d 30 th	19
4	31 s/d 40 th	31
5	41 Keatas	20
JUMLAH		70

NO	JAM	JML
1	00.00-03.00	25
2	03.00-06.00	32
3	06.00-09.00	1
4	09.00-12.00	2
5	12.00-15.00	1
6	15.00-18.00	2

7	18.00-21.00	1
8	21.00-24.00	6
JUMLAH		70

Sumber : Urmintu Sat Samapta Polres Sukoharjo

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi awal

Dalam menjalankan fungsi dan tugas satuan samapta Polres Sukoharjo terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja satuan tersebut. Pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi, Polres Sukoharjo melalui fungsi Samapta selaku pengembangan salah satu fungsi preventif terhadap gangguan kamtibmas yang terjadi di masyarakat. Lebih spesifik yaitu Unit Patroli Roda Empat yang bertugas untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap tindak kejahatan yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara terhadap Kasat Samapta, Kanit Turjawali satuan samapta, anggota satuan Samapta dan masyarakat sekitar, untuk pelaksanaan patroli di Polres Sukoharjo sudah dilaksanakan, namun dari data kejadian tindak pidana terutama pencurian dengan pemberatan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh anggota Satuan Samapta masih belum efektif dan efisien. Pelaksanaan patroli tersebut di sebabkan oleh faktor-faktor baik pendukung maupun penghambat. Penulis membahas faktor pendukung dan penghambat menggunakan teori analisis SWOT

3.2.1 Faktor Pendukung

3.2.1.1 *Strength* atau kekuatan

Faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan patroli roda empat satuan samapta Polres Sukoharjo. Hal ini merupakan nilai tambah bagi pelaksanaan patroli di wilayah Kabupaten sukoharjo, meliputi:

a. Jumlah kendaraan bermotor yang memadai

Tabel 3. 2
Data Kendaraan bermotor Satuan Samapta

NO	JENIS MATERIIL	JUMIAH				KET
			B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7
I.	R2					
1	KAWASAKI KLX	15	15			
2	VERZA	3	3			
3	VIXION	5	5			
4	VIXION BARU	7	7			
5	SUZUKI D200R	3	3			
6	SUZUKI TS 125	5	5			
7	RX KING	2	2			
	Jumlah	40	40			
II	R4					
1	LANCER	2	2			
2	NISSAN AIMIRA	2	2			
3	AVANZA	1	1			
4	HILUX	1	1			
5	TRITON	1	1			
6	LAND CRUISER	1	1			
7	MAZDA T-50	1	1			
8	NAVARA SI	1	1			
9	ISUZU PANTER	1	1			
10	ISUZU D-MAX	1	1			
	Jumlah	12	2			
III	R6					
1	TATA DAEJI	1	1			
2	MITSUBISHI	1	1			
	Jumlah	2	2			

Sumber : Urmintu SatSamapta Polres Sukoharjo

Berdasarkan hasil observasi pada tabel 3.2 yang penulis dapatkan dari Urmintu Satuan Samapta Polres Sukoharjo ditemukan bahwa jumlah kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh

satuan samapta Polres Sukoharjo berjumlah 12 (dua belas) unit. Hal ini menjadi pendukung bagi Unit patroli roda empat dalam melaksanakan tugas guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dan berdasarkan observasi dari penulis didapati bahwa kendaraan roda empat dalam keadaan baik dan siap pakai.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Kanit Turjawali AIPTU Rusmani S.H. pada tanggal 25 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa:

“ Jumlah kendaraan bermotor satuan samapta khusunya kendaraan bermotor roda empat dalam keadaan baik dan siap pakai, kami sangat terbantu karena kendaraan operasional yang dirawat dan dalam kondisi siap pakai guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kab. Sukoharjo”

b. Dorongan dan motivasi dari pimpinan terhadap anggota

Adanya dorongan dan motivasi dari pimpinan terhadap anggota merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas guna mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini juga bertujuan untuk membentuk sebuah ikatan yang harmonis dan kekompakan dalam pelaksanaan tugas. Pentingnya motivasi terhadap anggota sangat penting untuk menanamkan rasa bangga dan menjaga semangat dalam melaksanakan tugas. Pemberian motivasi dan dorongan ini diberikan setiap pagi pada saat melaksanakan apel.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Kasat Samapta pada tanggal 18 Oktober 2022, yang menyatakan bahwa:

“ Motivasi untuk anggota dalam pelaksanaan tugas itu merupakan hal yang sangat penting, saya melaksanakan hal ini setiap hari pada saat

pelaksanaan apel pagi karena menurut saya hal ini sangat penting terutama bagi bintara remaja yang baru lulus pada tahun ini. Saya ingin menumbuhkan rasa bangga terlebih dulu terhadap dalam satuan samapta, apabila sudah ada rasa bangga itu, maka dalam pelaksanaan tugas akan maksimal dengan dibantu dengan motivasi dari pimpinan”.

3.2.1.2 Opportunities atau Peluang

Peluang yang dimiliki oleh Polres Sukoharjo dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu:

- a. Dukungan dari masyarakat dengan cara menerima kedatangan polisi di wilayah yang menjadi titik rawan kejahatan pencurian dengan pemberatan.

Salah satu bentuk kerja sama satuan samapta Polres Sukoharjo dengan masyarakat yaitu menempelkan poster nomor polisi di pos kamling pada tempat terjadi rawan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat agar unit patroli roda empat dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Turjawali AIPTU Rusmani S.H pada tanggal 27 Oktober 2022, yang menyatakan bahwa:

“Memang perlu adanya kerja sama antara kita dengan masyarakat, salah satu bentuknya yaitu kita mendatangi pos kamling yang menjadi titik rawan tindak pidana curat, selain itu kami menempelkan poster nomor telepon kepolisian agar memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan apabila melihat atau mengetahui adanya tindak kejahatan.”

- b. Dukungan dari unit lain Polri dan instansi terkait pada pelaksanaan patroli

Sejatinya tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya diemban oleh fungsi Kepolisian tetapi dari masyarakat dan juga instansi terkait, salah satu dukungan berasal

dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja Sukoharjo. Dan dukungan juga berasal dari satuan lalu lintas juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pelaksanaan patroli roda empat.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Kasat Samapta AKP Sri Harjanto S.Sos. pada tanggal 5 November 2022, yang menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan patroli, kami mendapatkan dukungan dari satuan lalu lintas dan juga dibantu oleh Satpol PP Sukoharjo untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini bertujuan agar memaksimalkan pelaksanaan tugas agar terciptanya kamtibmas yang kondusif.”

3.2.2 Faktor Penghambat

3.2.2.1 *Weakness* atau kelemahan

Faktor kelemahan yang menghambat dalam pelaksanaan patroli roda empat Satuan Samapta di Polres Sukoharjo sehingga pelaksanaan patroli tidak berjalan dengan maksimal adalah sebagai berikut:

- a. Kuantitas personel satuan samapta Polres Sukoharjo tidak sesuai dengan DSP dari aturan SOTK Polri menurut Perkap No.2 Tahun 2021.

Kuantitas dari personel Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sukoharjo yang masih kurang dari jumlah yang ada dalam DSP menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam pelaksanaan patroli. Sesuai dengan Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Polri Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Tahun 2022 bahwa untuk jumlah personel Satuan Samapta yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Data Personel Satuan Samapta Polres sukoharjo
sesuai DSP dan RIIL Tahun 2022

NO	KEPANGKATAN	DSP	RIIL	KET
1	2	3	4	5
1.	AKP	1	1	
2.	IPTU	2	2	
3.	IPDA	2	-	
4.	AIPTU	3	4	
5.	AIPDA	3	-	
6.	BRIPKA	5	6	
7.	BRIGADIR	11	6	
8.	BRIPTU	34	11	
9.	BRIPDA	59	37	
	JUMLAH	122	64	

Sumber: Urmintu Samapta Polres Sukoharjo tahun 2022

Tabel 3. 4
Susunan Jumlah Personel Satuan Samapta Tingkat Polres

NO	SAT SAMAPTA	PANGKAT	GOI	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kasat Samapta	AKP	IV A	1
2	Kaurbinopsnal	IP	IV B	1
3	Paurmintu	IP	IV B	1
1	2	3	4	5
4	Bamin	BA	-	4
5	Banum	PNS II/I	-	2
6	Kanit Turjawali	IP	IV B	1
7	Banit	BA	-	40
8	Kanit Pamobvit	IP	IV B	1
9	Banit	BA	-	10
10	Kanit Dalmas	IP	IV B	2
11	Kasubnit	IP	IV B	2
12	Banit	BA	-	60
	JUMLAH			125

Sumber Data: Nomenklatur dan Titelatur Susunan Organisasi Polri 2022

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 diatas bahwa jumlah personel Unit Patroli Turjawali idealnya sesuai dengan aturan yang berlaku adalah sebanyak 40 orang ditambah satu orang kanit. Hasil observasi

yang dilakukan oleh penulis di Polres Sukoharjo bahwa jumlah personel Patroli Satuan Samapta sebanyak 15 orang ditambah 1 orang Kanit. Dapat disimpulkan bahwa jumlah personel Patroli Satuan Samapta masih kekurangan personel dan masih banyak dari unit lain melakukan tugas merangkap untuk menambah kekuatan personil dari unit Turjawali, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya proses pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui patroli Satuan Samapta di Polres Sukoharjo. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasat Samapta Polres Sukoharjo yaitu sebagai berikut:

“Untuk personel dari Satuan Samapta Polres Sukoharjo sejumlah 68 personel, akan tetapi untuk anggota Patroli sebanyak 6 anggota patroli dan 4 anggota lainnya dari Dalmas. Untuk Unit Turjawali Polres Sukoharjo tidak ada anggota patroli roda empat secara khusus, namun untuk pelaksanaan Patroli roda empat sendiri kami menggunakan dari unit lain yang merangkap menjadi patroli roda empat Satuan Samapta. Hal tersebut dikarenakan jumlah personel patroli di Polres Sukoharjo masih jauh dari jumlah personel yang seharusnya menurut Nomenklatur dan Titelatur susunan organisasi Polri tahun 2022 yaitu sebanyak 40 anggota ditambah satu orang Kanit. Karena keterbatasan anggota tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan patroli dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.”

Selain dari jumlah personel yang masih kurang, kemampuan dan pemahaman personel tentang patroli juga masih sangat minim. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota Satuan Samapta sebagai berikut:

“Saya sebenarnya belum memahami tentang patroli dan bagaimana pelaksanaan yang seharusnya. Saya belum pernah mengikuti pelatihan atau dikjur fungsi Samapta dan rekan-rekan saya yang lain juga belum pernah mengikuti karena kami baru saja lulus

pendidikan Bintara tahun ini sehingga kami melakukan patroli sekedarnya sesuai arahan dari pimpinan. Saya melaksanakan patroli sesuai dengan arahan dari senior saya yang sudah berpengalaman."

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah satu anggota Satuan Samapta, dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota Satuan Samapta Polres Sukoharjo belum pernah melaksanakan pelatihan atau pendidikan kejuruan fungsi Samapta sehingga dalam pelaksanaan tugasnya para personel tidak maksimal.

b. Kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas satuan samapta

Dalam pelaksanaan tugas, diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan tugas. Pada pelaksanaan kegiatan Patroli roda empat dibutuhkan prasarana berupa tempat atau ruangan dan perlengkapan patroli. Satuan Samapta Polres Sukoharjo belum memiliki ruangan khusus untuk anggota patroli sehingga para personel patroli yang ingin beristirahat harus pergi ke barak untuk beristirahat. Hal ini menghambat untuk pelaksanaan patroli, karena ketika akan melaksanakan kegiatan patroli para personel tidak berada dalam satu ruangan sehingga akan lebih sulit untuk memberikan informasi atau perintah.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kasat Samapta Polres Sukoharjo pada tanggal 15 Oktober 2022, hasil wawancara tersebut seperti dibawah ini:

"Untuk Satuan Samapta Polres Sukoharjo masih kekurangan ruangan untuk tiap Unit. Untuk Unit Turjawali sendiri belum ada ruangannya, sehingga untuk anggota yang sedang melaksanakan piket cadangan atau yang sedang beristirahat harus kembali ke barak atau menumpang di ruang lain. Hal ini menyebabkan susahnya untuk memberikan informasi terbaru dari pimpinan sehingga kegiatan biasanya mundur dari jadwal yang seharusnya

karena menunggu personel yang lain. Untuk saat ini ruangan yang dimiliki Satuan Samapta hanya 3 ruangan, yaitu ruangan Kasat Samapta, ruangan administrasi dan ruang Dalmas."

c. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas

Uang merupakan alat tukar dan juga sebagai alat untuk pengukur nilai. Uang merupakan faktor untuk mendukung pelaksanaan tugas Patroli pada satuan samapta Polres Sukoharjo agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Untuk pelaksanaan patroli di Polres sukoharjo sudah menyediakan anggaran patroli rutin.

Tabel 3. 5

Anggaran patroli rutin satuan samapta Polres Sukoharjo

NO	URAIAN	JUMLAH
1	UANG SAKU	Rp. 15.000
2	UANG MAKAN	Rp. 25.000
3	DANA SATUAN	Rp. 5.000

Sumber: Urmintu SatSamapta Polres Sukoharjo

Berdasarkan tabel 3.5 yang penulis dapat dari Urmintu Satsamapta Polres Sukoharjo bahwa anggaran patroli rutin telah diberikan, namun pada pelaksanaanya dan hasil observasi penulis ketika mengikuti pelaksanaan patroli, masih menggunakan uang pribadi dari anggota yang melaksanakan patroli.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Kanit Turjawali AIPTU Rusmani S.H pada tanggal 13 Oktober 2022, yang menyatakan bahwa:

"Untuk uang operasional kami menggunakan uang pribadi untuk makan dan mengisi bahan bakar dari kendaraan yang digunakan, belum ada anggaran yang diberikan ke kami pada saat melaksanakan patroli."

3.2.2.2 *Threats* atau Ancaman

Ancaman yang hadir dalam pelaksanaan patroli roda empat guna mencegah tindak pidana pencurian dengan

pemberatan, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya ancaman tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sekitarnya.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu masyarakat yang belum mampu menjaga barangnya dengan baik, maksudnya adalah masyarakat masih belum ada kesadaran bahwa tindak kejahatan itu datang salah satunya karena ada niat dan kesempatan. Salah satu contohnya adalah ketika masyarakat meninggalkan rumah pada saat mau ke masjid atau ke tempat yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Mereka meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu dengan alasan hanya sebentar dan tidak jauh dari rumah. Kemudian masih banyak masyarakat yang meninggalkan kendaraan tanpa di kunci stang khususnya kendaraan roda dua sehingga masih banyak terjadi tindak kejahatan. Pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Dulu saya pernah menjadi korban kasus pencurian, waktu itu saya meninggalkan rumah dalam keadaan pintu terkunci namun pagar rumah terbuka dan motor saya tidak dikunci stang karena saat itu saya hanya keluar untuk membeli kebutuhan rumah yang tidak jauh dari rumah.”

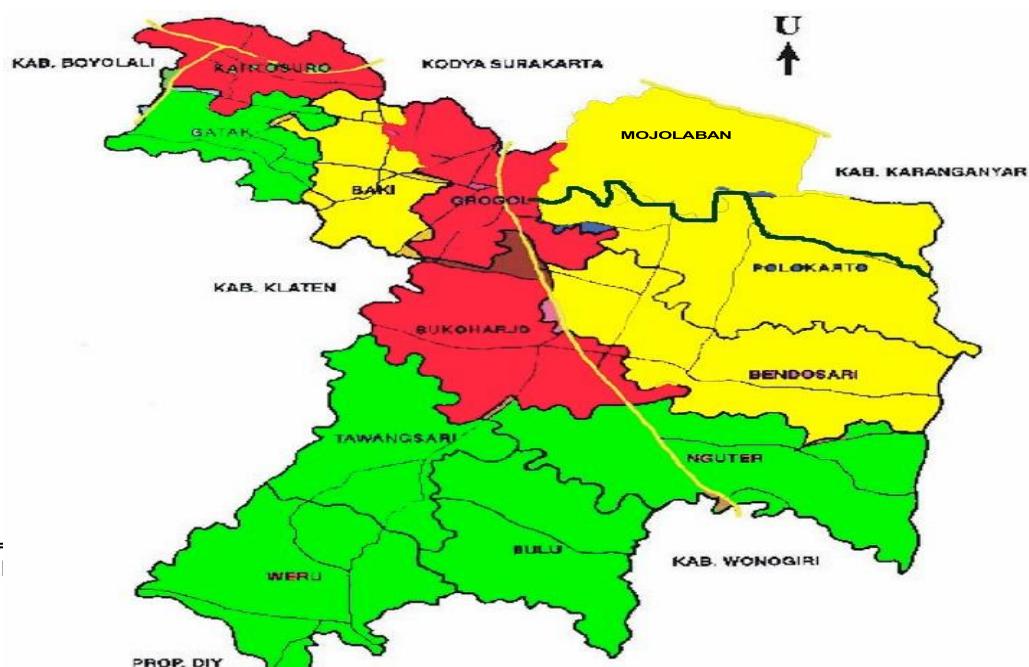
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran terhadap ancaman kejahatan masih belum ada. Apabila kita lengah dalam melakukan sesuatu, hal tersebut sama saja memberikan kesempatan kepada orang yang punya niat jahat. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta pada

tanggal 18 Oktober 2022, hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya pelaksanaan patroli serta tindakan pencegahan lain sudah kami laksanakan, namun masih saja terjadi tindak kejahatan di Kabupaten Sukoharjo. Ada beberapa faktor dari luar juga yang dapat mempengaruhi pelaksanaan patroli Satuan Samapta. Faktor tersebut adalah masyarakat, lingkungan masyarakat, ekonomi, pengangguran, luasnya wilayah dan pergaulan. Masyarakat belum bisa menjaga barangnya sendiri, misalnya mereka masih sering meninggalkan rumahnya tanpa dikunci ketika pergi ke tempat yang tidak jauh dari rumahnya. Selain itu wilayah Kabupaten Sukoharjo yang luas menjadi kendala karena ada beberapa kampung yang jarak dari Polres terlalu jauh dan medan yang ditempuh menggunakan kendaraan roda empat sehingga jarang terjangkau patroli dari Polres.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta Polres Sukoharjo, Aiptu Rusmani S.H. diatas dapat diketahui bahwa masih kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk menjaga barang- barangnya secara lebih aman. Selain itu yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli roda empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo adalah jarak dan medan yang ditempuh menggunakan kendaraan roda empat untuk menjangkau wilayah yang jauh.

- b. Jarak antar daerah yang sering terjadi kejahatan tindak pidana curat jauh

Gambar 3. 4
Peta daerah rawan Kejahatan



Sumber: Urmintu SatSamapta Polres Sukoharjo

Tabel 3. 6
Rute Patroli Satuan Samapta Polres Sukoharjo

NO	RUTE PATROLI PER ZONA	KET
1.	ZONA 1 (UTARA)MELIPUTI 1. KECAMATAN GROGOL 2. KECAMATAN BAKI 3. KECAMATAN GATAK 4. KECAMATAN KARTASURA	UNTUKKEGIATAN PATROLI SESUAI RUTE YANG SUDAH DI TENTUKAN MENCAKUP 4 KECAMATAN SETIAP KEGIATAN PATROLI SATSAMAPTA
2.	ZONA 2 (TIMUR) MELIPUTI 1. KECAMATAN MOJOLABAN 2. KECAMATAN POLOKARTO 3. KECAMATAN BEDOSARI 4. KESAMATAN SUKOHARJO KOTA	
3.	ZONA 3 (SELATAN) MELIPUTI 1. KECAMATAN TAWANGSARI 2. KECAMATAN BULU 3. KECAMATAN WERU 4. KECAMATAN TAWANGSARI	

Berdasarkan Gambar 3.4 dan tabel 3.6 dapat dilihat adanya jarak antar kecamatan yang rawan terjadi kejahatan dengan rute patroli memerlukan waktu dan jarak tempuh yang cukup jauh dari Polres Sukoharjo menuju ke lokasi rawan kejahatan tersebut.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dari penulis dengan Kasat Samapta pada tanggal 2 November 2022, yang menyatakan bahwa:

“Ada beberapa lokasi yang menjadi titik rawan kejahatan curat, namun karena lokasi yang jauh dan memerlukan jarak tempuh yang cukup lama, sehingga kami lebih sering melimpahkan ke polsek terdekat untuk melaksanakan.”

3.3 Metode Pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta dalam rangka mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo

Kinerja Unit patroli roda empat yang dilaksanakan oleh

Polres Sukoharjo agar situasi dan kondisi keamanan di wilayah hukumnya menjadi lebih kondusif dan tindak kejahatan menjadi berkurang khususnya untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Menyikapi permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang masih terjadi, pihak Polres Sukoharjo melakukan upaya pencegahan melalui Patroli Samapta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa masalah dari patroli roda empat adalah sumber daya manusia, baik itu dari kepolisian maupun dari masyarakat. Manajemen yang baik diperlukan oleh pimpinan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Patroli di wilayah Polres Sukoharjo.

Sebuah kegiatan tanpa adanya manajemen yang baik pasti tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Setelah ada perencanaan dilanjutkan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, dan terakhir adalah tahap pengawasan dan pengendalian agar tujuan dari kegiatan dapat tercapai. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kapolres Sukoharjo, sebagai berikut:

“Untuk upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah kita lakukan, khususnya untuk giat patroli roda empat. Namun masih ada kendala yang menghambat seperti dari personel itu sendiri masih belum melaksanakan tugas patroli dengan maksimal, sehingga untuk tujuan patroli roda empat belum tercapai sepenuhnya. Untuk menyikapi hal ini kita perlu manajemen yang baik agar pelaksanaan tugas bisa maksimal. Maka dari itu Kasat Samapta saya perintahkan untuk membuat perencanaan dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengawasan tugas hingga tahap pegakhiran sehingga pelaksanaan tugas patroli roda empat bisa terlaksana dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, patroli sudah dilaksanakan oleh Satuan Sampata Polres Sukoharjo, namun masih ada beberapa kendala baik dari petugas patroli maupun dari pihak masyarakat, kendala tersebut mengakibatkan pelaksanaan patroli tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu diperlukan sebuah perencanaan yang baik agar tujuan dari patroli bisa tercapai. Perencanaan yang sudah dibuat tidak akan berhasil apabila tidak dilaksanakan dengan baik, maka dari itu perencanaan yang telah dibuat dilaksanakan dengan optimal sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Upaya meminimalisir tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Sukoharjo telah dilakukan oleh Satuan Samapta dengan melaksanakan giat patroli, namun pelaksanaannya masih belum maksimal karena dalam pelaksanaannya para personel masih melakukan patroli sekedarnya tanpa memperhatikan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya tindak kejahatan. Pelaksanaan Patroli roda empat di Polres Sukoharjo dilaksanakan oleh anggota Raimas, hal ini dikarenakan kurangnya personel dari Unit Patroli sehingga Kasat Samapta mengambil kebijakan untuk pelaksanaan Patroli dialogis dilaksanakan oleh unit Raimas dengan alasan Unit Raimas jarang beroperasi dan lebih sering berada di Mako, oleh karena itu Kasat mengambil kebijakan tersebut.

Berdasarkan temuan penulis, untuk pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh personel Samapta belum sesuai dengan manajemen pelaksanaan tugasnya sehingga belum optimal. Pengoptimalisasian Patroli dialogis Satuan Samapta Polres Sukoharjo ini akan di bahas oleh penulis menggunakan teori manajemen POAC yang dicetuskan oleh George R. Terry. Teori ini terdiri dari perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan

(controlling).

3.3.1 Perencanaan (planning)

Perencanaan yaitu menetapkan pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan oleh petugas Patroli roda empat untuk mencapai tujuan penugasan. Berdasarkan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 maka Polres Sukoharjo membuat SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan patroli baik roda empat maupun roda dua. SOP patroli yang digunakan oleh Satuan Samapta Polres Sukoharjo tentang persiapan sebelum melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Surat Perintah Tugas.
- b. Menyiapkan kekuatan petugas patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personil, kelengkapan perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli.
- d. Menetukan rute berangkat dan rute kembali.
- e. Menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas patroli lainnya.
- f. Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit – unit patroli. Berdasarkan SOP pada tahap persiapan patroli tersebut,

pelaksanaan perencanaan Patroli roda empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo sudah melaksanakan sesuai SOP, namun masih ada kendala dalam pelaksanaan Patroli tersebut. Kendala-kendala pelaksanaan Patroli tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Patroli roda empat tidak sesuai DSP. Perencanaan yang telah dilakukan oleh Satuan Samapta adalah melibatkan Unit Raimas dalam pelaksanaan Patroli roda empat di Polres Sukoharjo.
- b. Petugas Patroli Satuan Samapta Polres Sukoharjo masih memiliki fungsi atau tugas rangkap, sehingga tidak optimal

dalam pelaksanaan tugasnya. Petugas Patroli roda empat berjumlah 3 dari 10 orang merupakan anggota personil Raimas. Sehingga ketika Unit Dalmas ada kegiatan maka anggota patroli yang dari Raimas akan kembali ke tugasnya pada Unit Dalmas. Bentuk perencanaan dari Satuan Samapta yaitu pengajuan penambahan personel untuk Satuan Samapta berhubungan dengan masuknya bintara yang lulus tahun 2023.

Informasi tersebut didapat dari hasil wawancara dengan Kasat Samapta AKP Sri Haryanto S.Sos. pada tanggal 25 Oktober 2022, sebagai berikut:

“Kami sudah berusaha melaksanakan tugas sesuai SOP yang sudah ada, namun masih ada beberapa kendala sehingga pelaksanaan patroli belum maksimal. Kendala tersebut adalah personel yang masih kurang. Karena Unit Patroli roda empat masih sangat kurang, saya mengambil kebijakan untuk Unit Raimas ikut memebantu pelaksanaan Patroli roda empat. Ternyata hal ini juga masih belum optimal, karena apabila unit Raimas dibutuhkan untuk menangani demo maka akan ditarik kembali oleh Unit dalmas sehingga Patroli roda empat tidak dilaksanakan. Oleh karena itu untuk perencanaan yang sudah dibuat belum terlaksana dengan baik.”

Berdasarkan wawancara tersebut Kasat Samapta Polres Sukoharjo sudah membuat perencanaan Unit Patroli dalam meminimalisir tindak pidana kejahatan terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan diawali dengan:

a. Menentukan Sasaran Patroli

Sasaran patroli merupakan objek yang menjadi titik fokus pelaksanaan patroli. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah Polres Sukoharjo. Dalam hal ini yang menjadi fokus dari pelaksanaan patroli yaitu daerah yang rawan terjadi tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

b. Menentukan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan

Sesuai dengan Perkabaharkam No.1 Tahun 2017 tentang patroli pada pasal 13 yang memuat tentang waktu pelaksanaan patroli secara garis besar membagi patroli rutin ini menjadi tiga bentuk, berupa empat banding sepuluh dimana dilaksanakan selama sepuluh jam selama empat hari dengan tiga *shift*, kemudian bentuk lima banding delapan yaitu dilakukan delapan jam selama lima hari dengan tiga *shift*, lalu kemudian yang terakhir yaitu pola tiga *shift* dilaksanakan selama 12 jam tiap hari dengan tiga *shift*. Namun pada pelaksanaannya para personel patroli tidak melaksanakan giat patroli setiap hari, namun mereka melaksanakan giat patroli apabila ada perintah dari pimpinan dan kejadian insidentil saja. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sehingga kegiatan patroli tidak berjalan dengan seharusnya.

2. Kekuatan personel yang dilibatkan

Personel yang dimiliki oleh Satuan Samapta sebanyak 68 personel, untuk Unit Patroli sebanyak 7 personel. Berdasarkan data yang sudah ada, Satuan Samapta khususnya Unit Patroli Polres Sukoharjo kekurangan personel. Personel untuk unit Patroli roda empat sesuai DSP adalah 24 orang, sehingga Unit Patroli Satuan Samapta Polres Sukoharjo mengambil kebijakan dengan melakukan penambahan personel dari unit Raimas sebanyak 3 personel untuk membantu pelaksanaan Patroli roda empat.

3. Menentukan sarana dan prasarana

Sebelum melaksanakan kegiatan, personel diharuskan untuk mengecek sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan agar tidak mengalami kendala. Untuk sarana dan prasarana Satuan Samapta belum mengalami kendala dalam pelaksanaan patroli roda empat.

c. Memberikan AAP dan motivasi

Dalam pelaksanaan Patroli oleh satuan Samapta, memberikan AAP dan juga motivasi kepada personel merupakan hal yang harus dilakukan oleh Kasat Samapta. Hal ini bertujuan agar personel yang sudah terlampir dalam surat perintah tugas mengetahui sasaran, tugas dan tanggung jawab, serta SOP yang berlaku dalam pelaksanaan patroli roda empat. Membuat personel termotivasi bertujuan untuk memaksimalkan kinerja dalam pelaksanaan patroli roda empat. Untuk satuan Samapta Polres Sukoharjo sudah melakukan motivasi kepada personel yang melaksanakan patroli dan juga telah memberikan AAP kepada unit Patroli roda empat Polres Sukoharjo.

3.3.2 Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian unit patroli dalam melaksanakan tugas patroli roda empat dilaksanakan dengan menentukan petugas patroli berdasarkan Surat perintah tugas dari Kasat Samapta. Personel yang sudah dipilih selanjutnya akan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan patroli. Unit Patroli Satuan Samapta Polres Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kanit yang berpangkat AIPTU. Tahapan pengorganisasian yang telah dilakukan oleh Unit Patroli Satuan Samapta adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan Personel

Mempersiapkan petugas pelaksanaan patroli dengan memilih personel yang memiliki kemampuan

dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Turjawali Samapta Polres Sukoharjo AIPTU Rusmani, S.H pada tanggal 10 Oktober 2022, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Kami memilih personel pelaksanaan patroli roda empat dengan memilih personel yang berkompeten dan mampu untuk memahami cara bertindak untuk meminimalisir tindak pidana yang terjadi. Kami juga mempertimbangkan usia serta kemampuan fisik dari personel patroli. Karena pelaksanaan patroli ini biasanya dilaksanakan secara rutin dan jarak tempuh yang jauh sehingga memerlukan kondisi fisik dan stamina yang baik. Maka dari itu dengan pertimbangan tersebut kami memilih anggota patroli yang masih muda dengan kondisi fisik yang baik.”

b. Mempersiapkan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan patroli roda empat akan dicek lalu dipersiapkan kemudian akan digunakan pada tahap pelaksanaan. Untuk sarana prasarana Satuan Samapta sudah mencukupi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan personel patroli Satuan Samapta pada tanggal 10 Oktober 2022, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Menurut saya, untuk sarana prasarana memang sudah terpenuhi baik dari kendaraan sampai perlengkapan patroli. “

Berdasarkan pernyataan anggota patroli tersebut untuk kendala yang dialami dari personel patroli tidak ada serta sarana dan prasarana sudah sesuai dengan SOP patroli.

c. Mempersiapkan Administrasi

1. Rencana kegiatan patroli
2. Jadwal patroli
3. Surat perintah tugas

4. Blangko laporan hasil patroli
5. Kelengkapan identitas petugas
6. Kelengkapan identitas kendaraan
7. Buku mutasi
8. Buku kontrol kendaraan
9. Buku saku petugas
10. Kartu identifikasi lapangan
11. Pesan kamtibmas

Dalam pengorganisasian, menyiapkan administrasi patroli juga sangat penting karena hal ini berkaitan dengan seluruh proses rangkaian kegiatan pelaksanaan patroli sehingga dalam pelaksanaannya dapat maksimal sesuai dengan administrasi yang telah dibuat berupa rencana kegiatan patroli pada hari itu dan personel yang bertugas juga sudah terlampir dalam surat perintah tugas serta pelaksanaan patroli harus sesuai dengan jadwal. Segala hal yang berkaitan dengan administrasi patroli merupakan hal yang wajib dimiliki oleh unit Patroli sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kendala. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kanit Turjawali Samapta ketika sedang wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Oktober 2022, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Untuk kelengkapan administrasi kami sudah melaksanakannya dan dalam tugas kami selalu mengecek dan membawa administrasi patroli tersebut mulai dari rengiat patroli, springas, kelengkapan petugas dan kendaraan. Namun untuk di polres sukoharjo, petugas unit patroli tidak memiliki buku saku dan juga kartu identifikasi lapangan, jadi kami melaksanakan patroli sesuai dengan jadwal dan rute yang ada dan kami juga selalu memberikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat apabila mengetahui, mengalami, atau melihat kejadian tindak pidana segera hubungi pihak yang berwajib.”

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kanit Turjawali polres Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa dalam proses kelengkapan administrasi patroli sebagian besar sudah

dilengkapi sesuai dengan SOP, namun ada beberapa hal yang belum dilengkapi seperti Kartu identifikasi lapangan, buku saku petugas.

3.3.3 Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan atau cara bertindak adalah bentuk implementasi dalam Patroli dialogis berdasarkan konsep perencanaan untuk pelaksanaan tugas personel. Sebelum melaksanakan tugas, para petugas harus tahu apa tugas, fungsi dan peranannya sehingga dalam pelaksanaan patroli dapat mencapai tujuan dan sasaran dari patroli. Untuk mencapai tujuan dari patroli maka pelaksanaan patroli harus sesuai dengan Perkabaharkam No 1 tahun 2017 pasal 22 tentang pelaksanaan patroli menggunakan roda empat.

Selain berpedoman dengan Perkabaharkam No 1 tahun 2017, Satuan Samapta Polres Sukoharjo memiliki SOP pelaksanaan yang berporos pada Perkabaharkam Polri No 1 tahun 2017. Berikut ini merupakan SOP pelaksanaan patroli Polres Sukoharjo:

- a. Menjelajahi daerah, rute, dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat adanya kemungkinan kerawanan.
- b. Mendatangi tempat-tempat pengamanan swakarsa seperti pos keamanan lingkungan, pos satuan pengamanan, dan pos-pos keamanan lainnya untuk melakukan tukar-menukar informasi.
- c. Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat/pemerintah yang bersifat sementara/situasional.
- d. Melakukan komunikasi terhadap masyarakat dengan maksud

memperoleh informasi-informasi penting bagi Petugas Kepolisian.

- e. Memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat.
- f. Mewaspadai kemungkinan berubahnya potensi gangguan, ambang gangguan menjadi gangguan nyata.
- g. Memberikan peringatan kepada warga masyarakat yang lalai mengamankan diri dan harta bendanya.
- h. Memberikan peringatan kepada warga masyarakat yang karena ketidak tahuannya melakukan pelanggaran.
- i. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- j. Melakukan tindakan terhadap pelanggaran tindak pidana ringan.
- g. Melakukan tindakan represif terbatas.
- h. Mencatat segala informasi yang didapat dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri kedalam buku catatan (blangko patroli)
- i. Melaporkan perkembangan selama melakukan kegiatan patroli terutama apabila dipandang perlu meminta bantuan lebih lanjut. Pelaksanaan Patroli roda empat Satuan Samapta sudah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya personel yang melaksanakan patroli hanya sekedarnya dan belum berpedoman dengan SOP patroli yang berlaku di Polres Sukoharjo. Alasan belum terlaksananya giat patroli dengan baik yaitu karena Patroli roda empat Satuan Samapta masih kekurangan personel, sehingga Kasat Samapta mengambil kebijakan untuk menempatkan secara sementara Unit Raimas untuk melaksanakan Patroli roda empat. Anggota Raimas yang mengikuti giat Patroli roda empat dalam pelaksanaan tugasnya tidak maksimal karena memiliki fungsi ganda. Informasi ini didapat dari hasil wawancara dengan salah satu anggota unit Raimas Polres Sukoharjo pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagai berikut:

“Sebenarnya saya anggota Raimas, tapi karena Unit Patroli roda empat kurang personel sehingga sebagian

anggota Raimas di perintahkan oleh Kasat Samapta untuk ikut dalam pelaksanaan Patroli roda empat. Kebanyakan personel Raimas yang merangkap fungsi sebagai petugas Patroli roda empat belum melaksanakan patroli sesuai SOP. Saya sendiri juga kadang merasa kelelahan untuk melakukan Patroli roda empat, sehingga kadang kami melakukan patroli sebentar kemudian selebihnya kami nongkrong di warung kopi. Setelah selesai, kami kembali ke Mako untuk membuat laporan hasil pelaksanaan patroli.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota unit Raimas yang terlibat dalam Patroli roda empat diatas, dapat diketahui bahwa personel unit Raimas yang terlibat dalam giat patroli belum melaksanakan Patroli roda empat sesuai dengan SOP patroli yang berlaku di Polres Sukoharjo, hanya beberapa poin dari SOP patroli Polres Sukoharjo yang dilaksanakan ketika melakukan patroli yaitu melakukan patroli sesuai rute yang telah ditentukan serta melihat adanya kemungkinan kerawanan, melakukan komunikasi terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi dan melaporkan perkembangan selama melakukan kegiatan patroli kepada pimpinan melalui alat komunikasi HT dan membuat laporan hasil pelaksanaan patroli ketika sudah selesai melakukan patroli, sedangkan untuk poin SOP patroli yang lain masih tidak terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh unit Raimas yang merangkap fungsi sebagai unit Patroli roda empat belum sesuai karena para personel belum pernah di jelaskan tentang SOP pelaksanaan patroli secara jelas, sudah seharusnya para personel Raimas diberikan pembekalan tentang pelaksanaan patroli yang baik dan benar sesuai dengan SOP patroli yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan patroli bisa mencapai hasil yang maksimal.

3.3.4 Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen

yang tidak berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan fungsi manajemen lainnya yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Tujuan pengawasan dan pengendalian yaitu memperlancar segala program atau perencanaan yang telah disusun dan direncanakan dengan baik sehingga tujuan awal dari patroli dapat terwujud. Pengawasan dan pengendalian ada dua, yang pertama adalah pengawasan dan pengendalian secara langsung yaitu yang dilakukan oleh Kanit Turjawali dan Kasat Samapta, sedangkan pengawasan dan pengendalian tidak langsung dilaksanakan oleh penjabat utama Polres Sukoharjo melalui HT. Informasi ini diperoleh ketika wawancara pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan Kasat Samapta Polres Sukoharjo, hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan patroli dilakukan oleh Kanit Turjawali dan saya sendiri. sedangkan pak Kapolres dan pejabat Polres lainnya biasa memantau melalui HT. Untuk pengawasan dari Kanit Turjawali sesuai SOP Polres yaitu dengan melakukan pengawasan melalui HT Unit Turjawali dan ketika terjadi kejadian menonjol Kanit akan melaporkan ke saya, dan saya melaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi. Selain memantau melalui HT, Kanit Turjawali juga melakukan pengecekan terhadap laporan hasil giat patroli yang telah dilaksanakan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasat Samapta diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh pimpinan di Polres Sukoharjo. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kanit Turjawali Samapta adalah dengan melaksanakan apel sebelum pelaksanaan patroli dan dalam pelaksanaan apel ini Kanit Turjawali Samapta akan menyampaikan AAP, informasi, rute, sasaran serta menekankan untuk selalu berkomunikasi dengan Mako sehingga pelaksanaan Patroli dapat terpantau oleh pimpinan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Kanit Turjawali Samapta dan Kasat

Samapta yaitu dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara langsung, Kanit Turjawali Samapta dan Kasat Samapta turun langsung atau ikut serta dalam pelaksanaan patroli sebagai Perwira pengendali untuk mengecek pelaksanaan giat patroli yang dilakukan oleh personel patroli sekaligus melihat situasi kamtibmas di wilayah Polres Sukoharjo.
- b. Secara tidak langsung bisa melaksanakan pengawasan dan pengendalian seperti berikut ini:
 1. Melakukan pengawasan dan pengendalian giat patroli yang dilaksanakan oleh personel patroli dengan menggunakan HT.
 2. Setelah melaksanakan giat patroli untuk personel wajib melaporkan hasil pelaksanaan serta temuan yang mereka temukan pada saat pelaksanaan patroli berupa laporan hasil kegiatan.

Hasil penelitian penulis ketika anggota melakukan giat patroli, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh pimpinan rata-rata mereka melaksanakan pengawasan secara tidak langsung berupa memantau dari HT saja dan melakukan pengecekan melalui laporan hasil pelaksanaan ketika patroli selesai dilaksanakan. Pimpinan jarang melakukan pengawasan dan pengendalian secara langsung, yang dimaksud dengan pengawasan dan pengendalian secara langsung adalah ikut serta dalam pelaksanaan patroli. Kemudian, sebelum personel melaksanaan kegiatan patroli tidak pernah diapelkan terlebih dahulu oleh Kanit Turjawali, KBO ataupun Kasat Samapta. Pimpinan memberikan perintah kepada anggota untuk melaksanakan kegiatan patroli tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu, pimpinan melakukan pengecekan hanya sekedarnya dan tidak melakukan pengecekan secara detail baik pengecekan jumlah personel,

sarana prasarana maupun administrasi. Hal ini merupakan salah satu kendala yang terjadi di Polres Sukoharjo. Selain itu, pada saat pelaksanaan patroli juga masih belum optimal karena pengawasan dan pengendalian yang kurang sehingga petugas patroli terkadang tidak melaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Informasi ini diperoleh ketika penulis melaksanakan wawancara dengan anggota Satuan Samapta Polres Sukoharjo, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Untuk pengawasan dari pimpinan hanya sekedaranya yaitu melalui HT saja. Pimpinan jarang terjun langsung ke lapangan atau ikut dalam pelaksanaan patroli, mereka hanya minta laporan situasi melalui HT. Pada saat sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan patroli juga jarang dilakukan pengecekan personel maupun kendaraan. Terkadang kami melakukan Patroli roda empat hanya dengan 4 personel menggunakan satu kendaraan roda empat dalam pelaksanaan patroli.”

Apabila sudah melakukan perencanaan dan pengorganisasian dengan baik, namun ketika pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan patroli tidak dilakukan maka tujuan dari patroli belum tentu bisa tercapai. Keseluruhan manajemen yang dilakukan oleh Unit Patroli roda empat masih tergolong kurang maksimal dalam pelaksanaannya, karena masih terdapat kendala dalam upaya mencegah tindak kejahatan yang terjadi di wilayah Polres Sukoharjo. Berbagai upaya telah dilakukan namun masih terjadi tindak kejahatan yang tinggi khususnya pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Sukoharjo.

Manajemen yang baik dapat merencanakan hal-hal yang harus dilaksanakan, apa saja yang harus dipersiapkan dan apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan. Unit Patroli Polres Sukoharjo masih memiliki kendala dalam tahap pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Dalam tahap pengorganisasian, Unit Samapta Polres Sukoharjo

belum dapat mempersiapkan personel dengan kuantitas sesuai dengan DSP dan kualitas yang memadai, pada tahap pelaksanaan Unit Samapta Polres Sukoharjo mengalami kendala yaitu dalam pelaksanaan patroli masih ada anggota unit lain yang merangkap fungsi sehingga pelaksanaan patroli hanya sekedarnya dan tidak sesuai dengan SOP yang ada pada Polres Sukoharjo.

Sedangkan dalam tahap pengawasan masih ada kendala yaitu pimpinan masih belum melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja anggota sehingga para petugas patroli tidak melaksanakan patroli sesuai dengan SOP di Polres Sukoharjo. Tujuan patroli dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan, sehingga tidak terjadi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

Upaya yang dilakukan oleh Unit Patroli roda empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo untuk mencegah atau meminimalisir tindak kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan upaya yang diharapkan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat, dimana tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Sukoharjo dapat berkurang atau menurun sehingga menciptakan kamtibmas yang kondusif.

3.4 Kualitas sumber daya manusia unit Patroli roda empat satuan samapta Polres Sukoharjo dalam mencegah tindak pidana curat di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

Dalam pelaksanaan patroli roda empat oleh Satuan Samapta Polres Sukoharjo diperlukan pengetahuan, kemampuan, dan juga sikap. Tiga hal ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi para personel di satuan Samapta khususnya yang mengemban fungsi untuk menjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan Patroli. Patroli roda empat yang dilaksanakan membutuhkan pengetahuan, kemampuan, sikap dari personel unit Patroli agar dalam pelaksanaannya maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Bahwa pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini yaitu berupa data pendidikan umum personel Unit Patroli roda empat. Kemudian kemampuan berkaitan dengan pendidikan pengembangan spesialis atau dikjur yang telah dilaksanakan oleh personel Unit Patroli Roda Empat di Polres Sukoharjo, dan terkait dengan sikap berkaitan dengan keinginan dan tingkah laku dari personel dalam pelaksanaan Patroli di Polres Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7

Data Pendidikan terakhir pesonel Sat Samapta Polres Sukoharjo

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	DIKUM
1	2	3	4	7
1.	SRI HARYANTO, S.Sos	AKP /76020282	KASAT SAMAPTA	S1
2.	HARIS MUTAKIN,S.H.	IPTU/67050273	KBO SAMAPTA	S1
STAF				
3.	ANA KUSWATI	IPDA/75020063	PAURMINTU SAMAPTA	SMA
4.	IBNU SUSILO,S.H.	BRIGADIR / 89036592	ANGGOTA SAMAPTA	S1
5.	JELANG PINKA PRAMADANI, S.H.	BRIPTU / 96010068	ANGGOTA SAMAPTA	S1
6.	ANANG BAGAS A	BRIPDA / 98020354	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
7.	DENI SETYAWAN	BRIPDA / 98020412	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
8.	AIDY RAMA KUSUMA	BRIPDA / 00020431	ANGGOTA SAMAPTA	S1
9.	SRI WIDADA	AIPTU / 67090121	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
SAT PAM OBVIT				
10.	JOKO SULISTYO, S.H	AIPTU / 77070213	KANIT PAM OBVIT	S1
11.	MUSTOFA J	BRIPTU / 96071070	SRITEX	SMA
12.	HERU KISWANTO	BRIPKA / 88070810	SRITEX	SMA

13.	HENRY FAISAL	BRIPKA / 86010396	DANIIRIS	SMA
14.	SUPARNO	BRIPKA / 78010519	DANIIRIS	SMA
15.	EKA AGAN PRASETYA	BRIGADIR / 87051158	PANCA BINTANG	SMA
16.	ANDRE UNGGUL W	BRIPTU / 95061023	KHAYANGAN	SMA
PENJAGAAN RU I				
17.	EFENDI HARAHAP, S.H	BRIPKA / 86010395	KAJAGA RU 1	S1
18.	ARIS MUNANDAR	BRIPTU / 96030551	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
19.	BAGAS YANUAR I	BRIPDA / 97010697	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
20.	YOGA ARIF RAHMADANI	BRIPDA / 99120801	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
21.	MUHKLISIN ANWARUL RAMADHAN	BRIPDA / 01110668	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
PENJAGAAN RU II				
22.	ADITYOKO,S.H.	BRIPKA / 85110924	KA JAGA RU 2	S1
23.	ANANG FALAKHUDIN SYAM	BRIPDA / 01070076	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
24.	CAHYO ADI SAPUTRO	BRIPDA / 01030268	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
25.	HAIDAR FATTAH ALWAN NABILLAH	BRIPDA / 02080598	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
26.	IRFAN HILMI RIZQULLAH	BRIPDA / 02030526	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
PENJAGAAN RU III				
27.	WAHYU BEY	BRIPKA / 86070671	KA JAGA RU III	SMA
28.	DEVA PRASKA D	BRIPTU / 97010042	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
29.	ADITYA NUR BAHARUDIN	BRIPDA / 02040069	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
30.	ALAND CAESAR AL MAJID	BRIPDA / 00080574	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
31.	ARMIANTO SIGIT RIZAIL	BRIPDA / 02030526	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
UNIT TURJAWALI				
32.	RUSMANI,S.H.	AIPTU / 77080260	KANIT PATROII SAMAPTA	S1
TON DALMAS				
33.	BUDI SUSILO	AIPTU / 65030270	PS. KANIT I DAIMAS	SMA
34.	AGUS SISWANTORO, S.H.	BRIPKA / 86080231	KASUBNIT DAIMAS I	S1

35.	DWI MARYADI	BRIPKA / 86061203	PS. KANIT II DAIMAS	SMA
36.	AGUS HANDOKO	BRIPKA / 77081182	KASUBNIT DAIMAS II	SMA
DALMAS RU I				
37.	SURYO WIBOWO,S.H.	BRIPTU / 96060071	ANGGOTA SAMAPTA	S1
38.	FERDIAN ANDRE S	BRIPTU / 97010630	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
39.	IAN ANGGA	BRIPTU / 97050670	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
40.	RAHMAT FENDI SAPUTRA	BRIPDA / 98090423	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
41.	MUHAMMAD RAFFI ALFARIDZI AB	BRIPDA / 01030177	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
42.	LESTYO ARDYANTORO	BRIPDA / 98020383	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
DALMAS RU II				
43.	EDY KISWANTO	BRIGADIR / 89050686	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
44.	SIGIT SETYO A	BRIPTU / 95060853	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
45.	DAVID NUR ROHMAT	BRIPDA / 98010638	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
46.	HITOMI JON ERIK SETYAJI	BRIPDA / 98070682	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
47.	ILHAM MEGAN GUSTAWA	BRIPDA / 99080441	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
DALMAS RU III				
48.	MUH. MANSHUR,S.H.	BRIPTU / 96070870	ANGGOTA SAMAPTA	S1
49.	ZAIM BUNTOMO	BRIPDA / 99060109	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
50.	ZAINAL ABIDIN N.	BRIPDA / 99020173	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
51.	CHANDRA DANIA SALIM	BRIPDA / 98090435	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
52.	ABU AMAR	BRIPDA / 96121009	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
53.	GILAR PANGGALIH	BRIPDA / 98060750	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
54.	KHRISNA ADDHY PURNOMO	BRIPDA / 99050640	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
UNIT SATWA				
55.	IRWIN NURSANTO,S.H.	BRIPKA / 87060885	KANIT SATWA	S1
56.	SEPTIAN AJI P	BRIGADIR / 87090985	ANGGOTA UNIT SATWA	SMA

BINTARA REMAJA				
57.	JOELLFAR ARGA DAHANA JR	BRIPDA / 03070444	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
58.	YANUAR DIVA PURWANTO	BRIPDA / 02010696	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
59.	CATUR WISNU PURNOMO	BRIPDA / 01070982	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
60.	YUSUF ARENDRA S	BRIPDA / 01110919	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
61.	LUCKY ARYANDIKA PUTRA	BRIPDA / 01051230	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
62.	NOVIAN WAHYUDI EKO N	BRIPDA / 02110564	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
63.	DAVID SETYA HERMAWAN	BRIPDA / 02070742	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
64.	FAISAL ANDROMEDA M	BRIPDA / 02020922	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
65.	ADJIE KRISNA M	BRIPDA / 03040512	ANGGOTA SAMAPTA	SMA
BKO				
66.	IAN DANARKO PRIAMBODO	BRIPDA / 99010667	BKO BAGOPS	SMA
67.	FARIDA NIIAMSARI,S.H.	BRIPDA / 97030240	AJUDAN	S1

Sumber: Urmintu Sat Sampta Polres Sukoharjo

3.4.1 *Knowledge* atau pengetahuan

Berdasarkan tabel 3.7 bahwa rata-rata pendidikan terakhir personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo yaitu lulusan SMA. Dapat disimpulkan bahwa anggota yang memiliki pendidikan S1 masih sedikit dan kaitannya dengan pengetahuan tentang Patroli roda empat masih belum maksimal sehingga dalam pelaksanaan tugas patroli hanya sekedar menjalankan sesuai perintah dari atasan.

Tabel 3. 8

Data pendidikan kejuruan personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	DIKBANGPERS

1	SRI HARYANTO., S.Sos	IPTU / 76020282	KASAT	DIKJUR JIBOM
2	ANIK SULISTYAWATI,S.H.	IPTU / 67100100	PAURMINTU	
3	IBNU SUSILO,S.H.	BRIGADIR / 89036592	ANGGOTA	DIKJUR SAR POIRI
4	BINTARI NUR WIDAYANTI	BRIPDA / 98010335	BENMA OBVIT	
5	ANANG BAGAS A	BRIPDA / 98020354	ANGGOTA	
6	DENI SETYAWAN	BRIPDA / 98020412	ANGGOTA	
7	SRI WIDADA	AIPTU / 67090121	ANGGOTA	
8	WAHYU BEY	BRIPKA / 86070761	ANGGOTA	
9	ADITYOKO,S.H.	BRIPKA / 85110924	ANGGOTA	
10	SUPARNO	BRIGADIR / 78010519	ANGGOTA	
11	TEGUH SUWARSONO	BRIPKA / 78090920	ANGGOTA	
12	DEDY EKO SUGIHARTO	BRIPKA / 79070783	ANGGOTA	
13	EKA AGAN PRASETYA	BRIGADIR / 87051158	ANGGOTA	
14	EFENDI HARAHAP	BRIPKA / 86010395	ANGGOTA	
15	IRFAN AUNFA ANIF	BRIPDA / 96051217	ANGGOTA	
16	ALDY RAMA KUSUMA	BRIPDA / 00020431	ANGGOTA	

17	ANANG FALAKHUDIN SYAM	BRIPDA / 01070076	ANGGOTA	
18	HENRY FAISAL DM	BRIPKA / 86010396	ANGGOTA	
19	DWI MARYADI	BRIPKA / 86061203	ANGGOTA	
20	GAIANG PAPIN WREDA	BRIPDA / 97010486	ANGGOTA	
21	IVAN ADJI NUGROHO	BRIPDA / 99100207	ANGGOTA	
22	MUHAMMAD RAFFI ALFARIDZI AB	BRIPDA / 01030177	ANGGOTA	
23	EDY KISWANTO	BRIGADIR / 89050686	ANGGOTA	
24	KHRISNA ADDHY PURNOMO	BRIPDA / 99050640	ANGGOTA	
25	AGUNG SURYONO,S.E.,M.M.	BRIPKA / 84071766	ANGGOTA	
26	HARIS MUTAKIN,S.H.	IPTU / 67050273	KBO SABHARA	
27	BUDI SUSILO	AIPTU / 65030270	KANIT DAIMAS I	
28	WARTO	AIPTU / 66070439	KANIT TURJAWAII	
29	AGUS SISWANTORO, S.H	BRIPKA / 86080231	ANGGOTA	
30	SURYO WIBOWO	BRIPTU / 96060071	ANGGOTA	DIKBANGPERS SABHARA
31	ARIS MUNANDAR	BRIPTU / 96030551	ANGGOTA	
32	DEVA PRASKA D	BRIPTU / 97010042	ANGGOTA	

33	IAN ANGGA DEWANTORO	BRIPTDA / 97050670	ANGGOTA	
34	FERDIAN ANDRE S	BRIPTDA / 97010630	ANGGOTA	
35	BAGAS YANUAR I.	BRIPTDA / 97010697	ANGGOTA	
36	RAHMAT FENDI SAPUTRA	BRIPTDA / 98090423	ANGGOTA	
37	HERU KISWANTO	BRIKADIR / 88070810	ANGGOTA	HARKAMTIBMAS FT SABHARA
38	MUH. MANSHUR,S.H.	BRIPTU / 96070870	ANGGOTA	DIKBANGPERS SABHARA
39	SIGIT SETYO A	BRIPTDA / 95060853	ANGGOTA	
40	ANDRE UNGGUL W	BRIPTDA / 95061023	ANGGOTA	
41	JOKO SUSILO IKANING	BRIPTDA / 97070495	ANGGOTA	
42	MUSTOFA J	BRIPTDA / 96071070	ANGGOTA	
43	DAVID NUR ROHMAT	BRIPTDA / 98010638	ANGGOTA	
44	HITOMI JON ERIK SETYAJI	BRIPTDA / 98070682	ANGGOTA	
45	ILHAM MEGAN GUSTAWA	BRIPTDA / 99080441	ANGGOTA	
46	AGUS HANDOKO	BRIPTKA / 77081182	ANGGOTA	
47	SARTONO	BRIPTDA / 97040120	ANGGOTA	
48	ADITYA OKTORA	BRIPTDA / 97100372	ANGGOTA	

49	APUT TRI NUGROHO	BRIPTDA / 96101145	ANGGOTA	
50	CHANDRA DANIA SALIM	BRIPTDA / 98090435	ANGGOTA	
51	ZAINAL ABIDIN N.	BRIPTDA / 99020173	ANGGOTA	

52	GILAR PANGGALIH	BRIPTDA / 98060750	ANGGOTA	HARKAMTIBMAS FT SABHARA
53	IRWIN NURSANTO	BRIPTKA / 87060885	KANIT SATWA	DIKBANGPERS K9
54	SEPTIAN AJI P	BRIGADIR / 87090985	ANGGOTA	
55	WIDYASARI MAHMUDI	BRIPTDA / 99120142	BKO	
56	FARIDA NILAMSARI	BRIPTDA / 97030240	BKO	
57	IAN DANARKO PRIAMBODO	BRIPTDA / 99010667	BKO	
58	GEVAIDO WIBI PRADIPTAMA	BRIPTDA / 00010168	BKO	
60	JOKO SULISTYO, S.H	AIPTU / 77070213	KANIT DAIMAS II	
61	LESTYO ARDIYANTORO	BRIPTDA / 98020383	ANGGOTA	
62	ABU AMAR	BRIPTDA / 96121009	ANGGOTA	
63	ZAIM BUNTOMO	BRIPTDA / 99060109	ANGGOTA	
64	YOGA ARIF RAHMADANI	BRIPTDA / 99120801	ANGGOTA	
65	CAHYO ADI SAPUTRO	BRIPTDA / 01030268	ANGGOTA	

66	ADITYA NUR BAHARUDIN	BRIPDA / 02040069	ANGGOTA	
67	ALAND CAESAR AL MAJID	BRIPDA / 00080574	ANGGOTA	

Sumber: Urmintu Sat Samapta Polres Sukoharjo

3.4.2 Skill atau kemampuan

Berdasarkan data pada tabel 3.8 bahwa anggota Satuan Samapta Polres Sukoharjo hanya 7 personel yang mengikuti pendidikan kejuruan namun hanya 5 yang mengikuti Dikjur tentang sabhara dari 67 personel di satuan samapta. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo belum mengikuti pendidikan kejuruan sabhara sehingga kemampuan personel Satuan Samapta belum maksimal dalam pelaksanaan tugas Patroli dan hanya mengikuti perintah dan arahan dari pimpinan.

3.4.3 Attitude (perilaku)

Berdasarkan Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (1) yang mengatakan bahwa *Quick Response* merupakan kecepatan Petugas Patroli dalam menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan menjadi 70 kasus tetapi penyelesaian kasus tersebut hanya 34 kasus. Data ini menunjukan bahwa kecepatan petugas Patroli dalam menyikapi dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat masih belum maksimal.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASAIAH

4.1 Kondisi Yang Diharapkan

4.1.1 Kondisi Yang Diharapkan dari Metode Pelaksanaan

**Patroli Roda Empat Satuan Samapta dalam rangka
mencegah tindak pidana pencurian dengan
pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo**

Patroli Satuan Samapta merupakan salah satu tindakan kepolisian sebagai upaya pencegahan tindak pidana di masyarakat. Dalam pelaksanaannya Patroli Satuan Samapta sudah dijelaskan dalam Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Peraturan tersebut dijelaskan bagaimana SOP Patroli yang baik dan benar dalam Patroli Satuan Samapta sehingga peraturan ini dipakai sebagai acuan dan pedoman bagi tiap-tiap Fungsi Teknis Samapta yang ada di seluruh Polres di Indonesia. Adapun tujuan dari Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo adalah bentuk wujud dari Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli diantaranya adalah meniadakan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan kamtibmas, serta mewujudkan rasa aman masyarakat. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan Patroli Roda Empat Polres Sukoharjo berdasarkan Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 tentang Patroli dan menggunakan Teori Analisa Manajemen POAC.

4.1.1.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemikiran yang logis dan rasional berdasarkan data atau informasi sebagai dasar kegiatan atau aktifitas organisasi,

manajemen, maupun individu dalam upaya mencapai tujuan. Sebelum melaksanakan Patroli Roda Empat, tentunya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan patroli. Berdasarkan Pasal 17 Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 BAB V Pasal 17 tentang tahap persiapan diantaranya terkait persiapan administrasi, serta terkait persiapan dan pengecekan perlengkapan patroli (personil dan ranmor).

Tahap persiapan administrasi sebagai mana dijelaskan pada pasal 17 Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli meliputi beberapa hal antara lain:

- a. Rencana Kegiatan,
- b. Jadwal Patroli,
- c. Surat perintah,
- d. Blangko laporan hasil patroli,
- e. Kelengkapan identitas petugas,
- f. Buku mutasi,
- g. Buku kontrol kendaraan,
- h. Buku saku petugas,
- i. Kartu identifikasi lapangan,
- j. Pesan kamtibmas.

Dalam pelaksanaan Patroli Roda Empat, seluruh kelengkapan administrasi diatas harus dibawa. Selain untuk menunjukan kelegalitan dalam pelaksanaan patroli, kelengkapan administrasi tersebut juga diperlukan sebagai acuan terkait beberapa laporan administrasi yang harus dibuat sebagai bukti pelaksanaan patroli. Namun beberapa hal yang ditemukan penulis pada perencanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP, diantaranya :

- a. Rencana kegiatan hanya dibagikan melalui chat Whatsapp yang ada pada ponsel pintar personil yang

melaksanakan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo dan tidak dipasang pada papan

Informasi Satuan Samapta Polres Sukoharjo. Kemudian disampaikan melalui AAP (acara arahan pimpinan) secara lisan pada saat sebelum melaksanakan Patroli Roda Empat.

- b. Beberapa administrasi yang tidak dimiliki Polres Sukoharjo khususnya Unit Turjawali Satuan Samapta Polres Sukoharjo berupa Blangko Pengecekan Ranmor, Buku Kontrol Kendaraan, Buku Sakut Petugas, Kartu Idenstitas lapangan.

Kemudian di dalam tahap perencanaan, terdapat beberapa peralatan kelengkapan patroli personel dan unit yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan Patroli Roda Empat. Berdasarkan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli pada Huruf A Nomor 3 tercantum bahwa beberapa peralatan sebagai kelengkapan patroli roda empat dan unit yang harus dibawa saat pelaksanaan Patroli Roda Empat. Beberapa perlengkapan diantaranya yaitu:

- c. Peralatan Patroli Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor R4
 1. Perlengkapan Satuan
 - a) Kendaraan Mobil Patroli : 1 unit;
 - b) Warning light : 1 unit;
 - c) Alat Komunikasi (Handy Talkie, Public Address dan Hand Phone) : 1 unit;
 - d) P3K : 1 unit
 2. Perlengkapan Perorangan
 - a) Pakaian PDI 1 Sabhara
 - b) Tongkat Polri
 - c) Borgol
 - d) Senter

- e) Rompi Suspender Reflector
 - f) Rompi anti peluru
3. Persenjataan
 - a) Senjata Api Genggam atau Senjata Api Iaras Panjang
 - b) Pelontar Gas Air Mata
 4. Personel
 - a) Anggota yang merangkap sebagai ketua : 1 orang
 - b) Pengemudi : 1 orang
 - c) Melaksanakan patroli paling minimal 2 (dua) orang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan, peralatan yang dippunyai Satuan Samapta Polres Sukoharjo sudah mendukung pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo. Akan tetapi penulis juga menemukan beberapa permasalahan terkait peralatan yang telah dimiliki Satuan Samapta Polres Sukoharjo dalam menunjang pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo. Beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya adalah:
- d. Ada beberapa peralatan Patroli yang dimiliki Satuan Samapta Polres Sukoharjo yang tidak dibawa pada saat melaksanakan Patroli Roda Empat yaitu:
1. Rompi Antri Peluru
 2. Tongkat Polri
 3. Borgol
 4. Warning light

4.1.1.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Selanjutnya, penulis akan membahas terkait jumlah personel berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoneisa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor bahwa jumlah DSP untuk Satuan Samapta suatu Polres

adalah sejumlah 122 personel dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ajun Komisari Polisi : 1 Personel
- b. Inspektur Polisi Tingkat Satu : 7 Personel
- c. Bintara : 111 Personel
- d. PNS II/I : 2 Personel
- e. PNS III : 1 Personel

Pada unit Turjawali jumlah personel yang dibutuhkan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor adalah sebanyak 41 personel.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan adanya kesenjangan antara jumlah personel berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dengan jumlah personel yang ada di lapangan. Berikut perbandingannya :

Tabel 4. 1

Perbandingan Jumlah Personel berdasarkan DSP Perkap Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dengan Jumlah

RIIL Personel

NO	SATUAN/UNIT	DSP	RIIL	KETERANGAN
1	Satuan Samapta	122 personel	67 personel	Kurang 55 personel
2	Unit Turjawali	41 personel	15 personel	Kurang 26 personel

Sumber: Penulis, Februari 2023

Kemudian permasalahan lain yang penulis temukan yaitu kualitas personel Satuan Samapta. Berdasarkan Tabel 4.1, dari 67 personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo hanya 7 yang mengikuti Pendidikan Kejuruan. Namun dari 7 personel yang

mengikuti Dikjur tersebut hanya 5 yang berkaitan dengan pelaksanaan Patroli.

4.1.1.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Dalam melaksanakan patroli terdapat ketentuan-ketentuan atau disebut SOP yang wajib dipedomani. langkah-langkah tersebut dibuat agar pada pelaksanaan Patroli Roda Empat, suatu unit atau seorang personel mempunyai acuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan Patroli Roda Empat diawali dengan pelaksanaan AAP (acara arahan pimpinan) yang diambil oleh perwira yang ditunjuk oleh Kasat Samapta untuk memberikan arahan dan atensi atau pesan dari pimpinan serta mengecek kesiapan dari personel dalam melaksanakan kegiatan Patroli Roda Empat. AAP (acara arahan pimpinan) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengendali taktis dan/atau pengendali teknis meliputi pemberian arahan kepada seluruh Petugas Patroli sebelum melaksanakan tugas Patroli. Berdasarkan Pasal 18 Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 dijelaskan terkait beberapa hal yang harus disampaikan pada saat AAP (acara arahan pimpinan), antara lain:

- a. Analisa dan Evaluasi (Anev) gangguan kamtibmas dan kalender Kamtibmas dinamis maupun statis
- b. Sasaran Patroli
- c. Bentuk Patroli
- d. Wilayah Patroli
- e. Area patroli (*beat*)
- f. Karakteristik kerawanan daerah/ objek sasaran Patroli
- g. Waktu Patroli
- h. Cara bertindak
- i. Larangan, berupa menyimpang dari wilayah patroli yang telah ditentukan, dan lain-lain sesuai yang dimuat dalam Perkabaharkam No.1 Tahun 201y tentang patroli pada

pasal 19 ayat (3)

j. Kewajiban

Namun hasil observasi yang penulis lakukan, pelaksanaan AAP (acara arahan pimpinan) tidak dilaksanakan oleh Kanit Turjawali sebelum melaksanakan Patroli Roda Empat melainkan hanya menunjuk personel yang melaksanakan Patroli kemudian menaiki kendaraan dan menuju ke sasaran Patroli.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli diatur terkait bagaimana pelaksanaan Patroli menggunakan kendaraan bermotor Roda Empat sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli
- b. Dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang memiliki sertifikasi mengemudi yang sah
- c. Mengendarai kendaraan di sebelah kiri jalan searah arus kendaraan
- d. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan tertentu sehingga Petugas Patroli
- e. Menggunakan sabuk keselamatan
- f. Dalam hal ini patroli pada malam hari dan/atau pencahayaan kurang, petugas patroli menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*)
- g. Menyalakan lampu kendaraan dan lampu rotator
- h. Membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan
- i. Berhenti di berbagai tempat secara acak, bervariasi dan berbeda untuk berdialog dan mengamati untuk mendapatkan informasi yang penting tentang situasi Kamtibmas
- j. Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan Kamtibmas dan/atau Kamseltibcar lantas.

Dari Observasi yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan Patroli Roda Empat secara umum telah sesuai dengan

Pelaksanaan Patroli menggunakan Kendaraan bermotor Roda Empat yang diatur pada pasal 23 Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Tetapi penulis menemukan bahwa pada saat pelaksanaan patroli malam hari, personel hanya menggunakan rompi anti peluru dan tidak menggunakan jaket keselamatan (*suspender reflector*).

Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa pada saat pelaksanaan Patroli Roda Empat tidak dilaksanakan sesuai dengan rengiat, tetapi dilaksanakan hanya untuk bahan pelaporan kepada pimpinan bahwa kegiatan Patroli Roda Empat telah dilaksanakan. Kemudian pada saat pelaksanaan Patroli Roda Empat melewati rute tercepat agar sampai ke sasaran tetapi tidak melewati rute patroli yang telah ditentukan.

4.1.1.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan terhadap sebuah kegiatan dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan SOP yang ada dan tidak diluar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dijelaskan bahwa Pengawasan Patroli dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Inspeksi mendadak
- b. Pemantauan/monitoring
- c. Supervisi
- d. laporan

Dari hasil Observasi dan Wawancara yang penulis lakukan, Pengawasan yang dilakukan hanya Pemantauan dan laporan. Pemantauan yang dilaksanakan yaitu pemantauan secara tidak langsung dengan menggunakan sarana HT dan via Whatsapp berupa laporan kegiatan yang dilaksanakan dengan mencantumkan dokumentasi pada akhir pelaksanaan kegiatan. Namun inspeksi mendadak tidak pernah dilakukan oleh pimpinan. Supervisi yang dilaksanakan hanya sesuai dengan jadwal supervisi yang dilakukan oleh DitSamapta

Polda Jawa Tengah dengan pemberitahuan seminggu sebelum pelaksanaan supervisi.

4.1.2 Kondisi yang diharapkan dari Kualitas sumber daya manusia unit Patroli roda empat satuan samapta Polres Sukoharjo dalam mencegah tindak pidana curat di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

Kualitas adalah tingkat baik buruknya ataupun taraf atau derajat sesuatu. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Menurut Sugeng (2002), kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan profesional. Dalam pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo memerlukan kualitas dari Petugas Patroli yang sesuai dengan kompetensinya sebagai Petugas Patroli. Pada bagian ini penulis akan membahas kondisi yang diharapkan dan pemecahan masalah dengan menggunakan Teori Kompetensi. Dengan adanya pembahasan terkait Kualitas Sumber Daya unit Patroli roda empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo ini, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas Patroli Roda Empat dalam rangka mencegah tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

4.1.2.1 Knowledge (pengetahuan)

Pengetahuan merupakan kemampuan tentang informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu bidang tertentu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dengan kemampuan pengetahuan yang sesuai dengan tugasnya maka

diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dalam kondisi apapun. Dalam Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 15 ayat

(1) dikatakan bahwa seorang Petugas Patroli harus memiliki kemampuan pengetahuan berupa penguasaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas Patroli, penguasaan peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, penguasaan wilayah penugasannya dan penguasaan teknologi informasi. Pada objek yang penulis teliti terkait dengan kualitas sumber daya manusia adalah personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo yang melaksanakan Patroli Roda Empat. Personel yang digunakan dalam pelaksanaan Patroli Roda Empat sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan Sarjana S1. Sehingga kondisi yang diharapkan dari penulis pada pengetahuan personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Dengan adanya lulusan Sarjana S1 yang lebih memiliki pengetahuan lebih dari lulusan SMA maka dapat mengajarkannya terkait pengetahuan dalam bertugas sesuai dengan Perkabaharkan Polri Nomor 1 Tahun 2017
- b. Para personel Satuan Samapta memiliki keinginan mengembangkan pengetahuan mereka dengan mempelajari Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017.

4.1.2.2 Skill (keterampilan)

Keterampilan merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik-teknik yang dapat digunakan pada suatu kondisi tertentu. Pada Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa seorang Petugas Patroli harus memiliki keterampilan seperti:

- a. Teknik dan taktik patroli, penggeledahan, penyitaan, pengawalan
- b. Intelijen dasar

- c. Komunikasi verbal maupun non verbal
- d. Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- e. Pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- f. Pengaturan lantas
- g. Membuat laporan lisan dan tertulis
- h. Memproses Tipiring
- i. Melakukan tindakan penegakkan hukum terbatas
- j. Mengemudi
- k. Beladiri Polri
- l. Penggunaan tongkat Polri m.
- Penggunaan Borgol
- n. Penggunaan senjata api atau senjata lain sesuai standar Polri Dalam objek yang penulis teliti terkait dengan keterampilan adalah

personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo. Berdasarkan Studi Dokumen yang penulis lakukan di Polres Sukoharjo ditemukan bahwa dari 67 personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo hanya 5 yang telah mengikuti pendidikan kejuruan berkaitan dengan Samapta. Sehingga kondisi yang diharapkan penulis pada keterampilan yang dimiliki personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo yaitu:

- a. Adanya pelatihan secara berkala yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo kepada personel yang belum memiliki keterampilan sebagai Petugas Polri
- b. Bagi personel yang telah mengikuti pendidikan kejuruan Samapta dapat mengajarkan keterampilan sebagai Petugas Patroli kepada yang belum melaksanakan pendidikan kejuruan Samapta.

4.1.2.3 Attitude (perilaku)

Perilaku merupakan sikap seseorang dalam menanggapi atau menyikapi sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pada Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (1) tertulis bahwa *Quick Respons* (cepat

tanggap) yaitu kecepatan petugas Patroli dalam menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat. Objek yang penulis teliti disini berupa personel Satuan Samapta dalam menanggapi laporan dari masyarakat terkait adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga kondisi yang diharapkan dari penulis pada perilaku yang dimiliki personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo yaitu:

- a. Adanya urutan skala prioritas yang wajib dipedomani oleh Petugas Patroli dalam menanggapi adanya laporan dari masyarakat sesuai dengan Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017.

4.2 Pemecahan Masalah

4.2.1 Pemecahan masalah dari Metode Pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta dalam rangka mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

4.2.1.1 Pemecahan Masalah dari Perencanaan Pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo

Berdasarkan Observasi yang penulis lakukan, terdapat beberapa masalah yang ditemukan pada tahap perencanaan pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo. Pada bagian ini penulis ingin memberikan solusi atau pemecahan masalah dari permasalahan yang ditemukan pada tahap perencanaan pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo.

- a. Kelengkapan Administrasi
 1. Menempelkan rencana kegiatan pada papan informasi Satuan Samapta Polres Sukoharjo agar dapat dilihat oleh seluruh personel dan mengetahui

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Mengadakan blangko Pengecekan Ranmor dengan tujuan untuk secara rutin melaksanakan pengecekan terhadap kendaraan bermotor yang akan digunakan dalam pelaksanaan Patroli, dengan melakukan pengecekan ini dapat meningkatkan pelaksanaan Patroli dan meningkatkan keamanan bagi personel yang melaksanakan patroli.
 3. Mengadakan Buku Kontrol Kendaraan yang dapat digunakan untuk memeriksa pemeliharaan kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala agar performa kendaraan selalu siap digunakan dalam pelaksanaan Patroli.
 4. Mengadakan Buku Saku Petugas agar bisa digunakan petugas yang melaksanakan patroli untuk mencatat hal-hal yang penting pada saat pelaksanaan Patroli dan juga untuk mengantisipasi apabila ponsel genggam dari petugas yang digunakan untuk mencatat mengalami kehabisan baterai.
- b. Kelengkapan Patroli Personel dan Unit.
1. Menekankan pada seluruh personel agar selalu membawa kelengkapan Personel dan Unit dalam setiap pelaksanaan Patroli Roda Empat
 2. Membawa warning light yang dapat digunakan pada saat malam hari ketika melaksanakan pengaturan apabila terjadi gangguan kameltibcar lantas.
 3. Membawa tongkat polri sebagai bentuk profesionalisme dalam pelaksanaan Patroli Roda Empat dan sebagai tindakan preventif apabila menemukan gangguna kamtibmas pada saat pelaksanaan Patroli Roda Empat.
 4. Membawa borgol sebagai bentuk pencegahan

apabila dalam pelaksanaan patroli petugas menemukan pelaku kriminal yang harus diamankan.

5. Membawa senter yang berguna sebagai alat penerangan pada saat melaksanakan Patroli Roda Empat pada malam hari di tempat-tempat yang kurang pencahayaan.

4.2.1.2 Pemecahan masalah dari Pengorganisasian pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo

Pada tahap pengorganisasian pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo terdapat dua masalah pokok yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian berupa Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen. Permasalahan tersebut terkait Kuantitas dan Kualitas Personel yang ada di Satuan Samapta Polres Sukoharjo. Berikut pemecahan yang penulis berikan tentang dua permasalahan pokok tersebut:

a. Kuantitas Personel

Meminta bantuan pada unit lain untuk pelaksanaan Patroli Roda Empat, contohnya unit Raimas serta personel yang sedang tidak melaksanakan piket untuk turut membantu pelaksanaan Patroli Roda Empat.

b. Kualitas Personel

1. Pihak polres mengajukan terkait pemberian pendidikan kejuruan kepada personel dan pelatihan dalam bidang patroli untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Samapta sebagai pengembang fungsi preventif dalam mencegah tindak pidana curat agar menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif

2. Mengadakan pelatihan Samapta kepada personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo di SPN terdekat

guna meningkatkan kemampuan personel.

3. Membuat forum dan pelatihan internal yang dilaksanakan secara rutin tentang pemberian teori dan praktik lapangan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan personel. Teknis pelaksanaannya dilakukan pemberian materi oleh personel yang telah mengikuti Dikjur Sabhara dan Dikjur Harkamtibmas kepada personel yang belum mengikuti Dikjur, kemudian melaksanakan Tes tertulis sesuai dengan isi dari Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 apabila pemberian materi telah selesai. Kemudian untuk pelaksanaan praktiknya melaksanakan tes keterampilan mengendarai kendaraan bermotor Roda Empat dengan berkoordinasi dengan Satuan lalu lintas Polres Sukoharjo.

4.2.1.3 Pemecahan Masalah dari Pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan tahap yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Pada tahap pelaksanaan Patroli Roda Empat ada beberapa aspek yang penulis amati. Dari beberapa aspek tersebut penulis menemukan beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Penulis akan memberikan pemecahan masalah terkait permasalahan yang ditemukan pada tahapan pelaksanaan Patroli Roda Empat.

- a. Pembuatan pedoman AAP yang mengacu pada Pasal 18 Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli yang sistematis, sehingga dalam pemberian AAP perwira yang ditunjuk dapat menyampaikan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat secara sistematis dan tertulis sebelum melaksanakan Patroli

Roda Empat dengan tujuan tidak ada kekeliruan dalam menyampaikan AAP kepada personel dan dapat dipahami semua materi yang disampaikan pada pemberian AAP dengan baik.

- b. Memerintahkan dan mewajibkan tentang penggunaan jaket keselamatan (*suspender reflector*) pada pelaksanaan Patroli Roda Empat pada malam hari dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan dari Petugas Patroli terutama di tempat yang kurang pencahayaan.
- c. Pelaksanaan patroli harus sesuai dengan rengiat yang dibuat serta rute patroli yang telah ditentukan. Pada saat pelaksanaannya wajib melampirkan dokumentasi pada titik-titik yang telah ditentukan menggunakan time stamp. Kemudian pada saat dokumentasi kegiatan menggunakan gaya yang berbeda setiap harinya sehingga pelaksanaan dilaksanakan dengan baik dan benar. Petuga Patroli wajib menggunakan kamera badan yang dipasang pada rompi anti peluru sebagai bukti pelaksanaan patroli. Pelaksanaan Patroli Roda Empat menggunakan kamera di mobil (*dashcam*) sebagai bukti telah melaksanakan patroli sesuai dengan rute dan rengiat yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat membantu pimpinan memantau secara tidak langsung dari time stamp dan video kamera mobil serta dari kamera badan yang melekat pada Petugas Patroli.
- d. Wajib membuat dan menyerahkan Blangko LHP setiap selesai melaksanakan kegiatan Patroli Roda Empat kepada Kanit Turjawali sebagai penanggung jawab pelaksanaan Patroli. Hal ini untuk meminimalisir penggerjaan blangko secara ropel.
- e. Berkoordinasi dengan Polsek-polsek jajaran untuk

membantu pelaksanaan Patroli dengan bantuan personel polsek apabila rute yang ditentukan tidak terjangkau dan mengantisipasi keterlambatan waktu akibat jarak yang ditempuh dari Polres Sukoharjo.

4.2.1.4 Pemecahan Masalah dari Pengawasan

Pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo

Pengawasan terhadap pelaksanaan Patroli Roda Empat diemban oleh seorang Kasat Samapta. Dalam tahap ini, Kasat Samapta memiliki tugas pokok untuk melakukan supervisi dan inspeksi mendadak. Penulis akan memberikan pemecahan masalah sebagai solusi terkait permasalahan yang ditemukan penulis pada tahap pengawasan Pelaksanaan Patroli Roda Empat.

1. Kasat Samapta melaksanakan supervisi incidentil kepada pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo secara berkala dengan tujuan agar secara langsung mengetahui Pelaksanaan Patroli Roda Empat sehingga Kasat Samapta dapat mengetahui situasi dan kondisi Petugas Patroli baik dari kendala atau kekurangan kinerjanya pada saat pelaksanaan. Dari hasil temuan pada supervisi incidentil tersebut bisa dijadikan bahan untuk melaksanakan evaluasi agar kedepannya tidak ada lagi kendala dalam Pelaksanaan Patroli Roda Empat. Pelaksanaan supervisi secara incidentil dilakukan tanpa sepengetahuan objek yang akan didatangi agar bisa melihat selayaknya objek tersebut melaksanakan kegiatan seperti tidak sedang supervisi.

4.2.2 Pemecahan Masalah dari Kualitas sumber daya

manusia unit Patroli roda empat satuan samapta Polres Sukoharjo dalam mencegah tindak pidana curat di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

4.2.2.1 Pemecahan Masalah Kualitas sumber daya dari Pengetahuan personel unit Patroli Roda Empat Polres Sukoharjo

Berdasarkan Observasi yang penulis lakukan, terdapat beberapa masalah yang ditemukan pada pengetahuan yang dimiliki oleh personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo. Pada bagian ini penulis ingin memberikan solusi pemecahan masalah dari permasalahan yang ditemukan dari pengetahuan personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo berupa:

- a. Membuat kelompok belajar yang didalamnya terdapat personel yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan agar dapat membagi ilmunya.
- b. Membuat tes tertulis terkait dengan Patroli sesuai dengan Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017.
- c. Membuat buku saku yang berisi tentang pengetahuan yang harus dimiliki seorang Petugas Patroli sesuai dengan yang tertulis dalam Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 dan mewajibkan para personel untuk memahami dan mempedomani isi dari buku saku tersebut kemudian mengimplementasikannya pada saat pelaksanaan Patroli Roda Empat.

4.2.2.2 Pemecahan Masalah Kualitas sumber daya manusia dari Kemampuan personel Unit Patroli Roda Empat Polres Sukoharjo

Berdasarkan Observasi yang penulis laksanakan, terdapat masalah yang penulis temukan dari Pengetahuan personel Unit Patroli Roda Empat Polres Sukoharjo tentang Patroli. Pada bagian ini penulis ingin memberikan solusi

pemecahan masalah terhadap pengetahuan personel Unit Patroli Roda Empat Polres Sukoharjo yaitu:

- a. Mengajukan secara berjenjang kepada pimpinan Polres untuk mengadakan pelatihan peningkatan kemampuan samapta untuk personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo yang dilaksanakan pada SPN setempat.
- b. Mendorong pesonel Satuan Samapta Polres Sukoharjo untuk mengikuti pendidikan kejuruan agar memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensinya berdasarkan Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017.

4.2.2.3 Pemecahan Masalah Kualitas Sumber Daya Manusia dari Perilaku personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo

Berdasarkan Observasi yang penulis lakukan, terdapat masalah dari Perilaku personel Satuan Samapta Polres Sukoharjo dalam pelaksanaan Patroli Roda Empat. Pada bagian ini penulis akan memberikan solusi pemecahan masalah tentang perilaku personel unit Patroli Roda Empat Polres Sukoharjo berupa:

- a. Kasat Samapta meningkatkan kinerja *Quick Respons* dengan menyiapkan regu siaga dari personel yang tidak dalam pelaksanaan tugas atau lepas piket yang akan mendatangi lokasi kejadian ketika ada laporan dari masyarakat sehingga bisa langsung menangani kejadian yang dilaporkan.
- b. Seorang Kanit Turjawali melaksanakan AAP dan menanamkan pemahaman bahwa Polisi sekarang merupakan Polisi yang Humanis dan tidak ada lagi sikap arogansi sehingga berpedoman bahwa Polisi itu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara Humanis.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Pencurian dengan pemberatan atau sering disebut Curat merupakan tindakan perbuatan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu dengan tujuan untuk memiliki kepunyaan orang lain secara melawan hukum. Pencurian dengan pemberatan sering terjadi di wilayah Hukum Polres Sukoharjo, sehingga hal ini tentunya menimbulkan gangguan kamtibmas. Menanggapi hal tersebut maka Polri melalui Satuan Samapta yang mempunyai fungsi preventif harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Unit Turjawali sebagai salah satu unit dari fungsi teknis kepolisian Satuan Samapta yang memiliki peran dalam tindakan preventif untuk mencegah sebelum terjadinya kejadian dengan tujuan untuk memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan pelaksanaan kegiatan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo dalam rangka mencegah pencurian dengan pemberatan masih belum optimal dilakukan.

- a. Pada Pelaksanaan patroli sudah sesuai dengan Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Tetapi masih terdapat beberapa fakta di lapangan yang menunjukan bahwa adanya tahapan dan aspek yang tidak dilaksanakan berupa tidak membawa kelengkapan yang sesuai dengan SOP yang berlaku dan juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal.

- b. Belum adanya terobosan kreatif yang berpedoman pada SOP dalam meningkatkan pelaksanaan Patroli Roda Empat dalam rangka mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo
- c. Personel unit patroli roda empat satuan samapta Polres Sukoharjo masih belum mempedomani dan memiliki pengetahuan tentang patroli sesuai dengan SOP pelaksanaan patroli sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli
- d. Personel unit patroli roda empat satuan samapta Polres Sukoharjo sebagian besar belum melaksanakan pendidikan kejuruan Samapta.

5.2 Saran

Melihat dan memahami kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran dengan maksud dan tujuan agar mengoptimalkan dan meningkatkan pelaksanaan Patroli Roda Empat Satuan Samapta Polres Sukoharjo dalam rangka mencegah pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.

- a. Kepada Kasat Samapta untuk melaksanakan evaluasi terkait rengiat yang dibuat telah mencakup daerah-daerah kerawanan tindak pidana curat, sehingga pelaksanaan patroli roda empat dapat dilaksanakan dengan optimal.
- b. Kepada Kasat Samapta untuk melakukan koordinasi dengan polsek jajaran Polres Sukoharjo untuk meminta bantuan personel dalam pelaksanaan patroli roda empat, mengingat luasnya cakupan wilayah hukum Polres Sukoharjo.
- c. Kepada Kanit Turjawali untuk meningkatkan aspek pengawasan kepada petugas yang melaksanakan patroli roda empat dengan tujuan agar pelaksanaan dapat terlaksana dengan baik sesuai SOP serta sesuai dengan

tujuan.

- d. Kepada Kasat Sampata untuk membuat terobosan kreatif terkait dengan pelaksanaan patroli roda empat sebagai salah satu bentuk inovasi dalam melaksanakan patroli roda empat sehingga membantu tujuan dari pelaksanaan patroli untuk menjaga situasi kamtibmas dalam rangka mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukoharjo.
- e. Kepada Kasat Samapta untuk membuat kelompok belajar kepada personel satuan samapta yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengadakan pelatihan secara berkala kepada personel Satuan Sampta sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli.
- f. Kepada Kasat Samapta untuk mendorong niat dan motivasi para personel untuk mengikuti pendidikan kejuruan samapta guna meningkatkan kemampuan serta pengetahuan yang bertujuan agar pelaksanaan Patroli menjadi optimal.
- g. Kepada Kasat Samapta untuk meminta kepada pimpinan secara bersurat terkait kurangnya dukungan BBM untuk melaksanakan Patroli sehingga pelaksanaan patroli bisa dilakukan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan*

Kepolisian Sektor.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Polri.*

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli.*

Akademi Kepolisian. *Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian.* Keputusan Gubernur Akademi

Kepolisian Nomor: KEP

Akademi Kepolisian. *Pedoman Penulisan Dan Penilaian Tugas Akhir Akademi Kepolisian.* Keputusan Gubernur Akademi
Kepolisian Nomor: KEP/154/X/HUK/4.5./2021).
Semarang : Akademi Kepolisian.

Buku:

Terry, George. 2006. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta:
Bumi Aksara, Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008.
Manajemen. Editor: Ari Setiawan. Yogyakarta:
Mitra Cendikia

Moelong, J Iexy. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Anggito, Albi, Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak

Tugas Akhir:

Tengku. Ilham Akbar. 2022. *Optimalisasi Patroli Satuan Samapta Dalam Mencegah Tindak Pidana Curat Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo. Tugas Akhiri.* Semarang: Akademi Kepolisian.

R. Rizqi. Agung Bimantoro Sukendro. 2022. *Upaya Patroli Dialogis Satuan Samapta Guna Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo. Tugas Akhiri.* Semarang: Akademi Kepolisian.

Niko. Arif Zulkarnaen. 2022. *Optimalisasi Patroli Roda Dua Satuan Samata Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Berrmotor Di Wilayah Hukum Polres Batang. Tugas Akhiri.* Semarang: Akademi Kepolisian

Skripsi:

Lucky. Andreaz. 2017. *Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Klaten.* Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.

Yobhel. Levic. De Fretes. 2017. *Optimalisasi Patroli bersinggungan Oleh Unit Patroli Roda Empat Satuan Sabhara Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Pati.* Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.